



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

MATRIKS PEMBANGUNAN



MATRIKS PEMBANGUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2024

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 PN: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional		19,5 %	59.415.717,9	
		02 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		95,20		
		03 - Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan		11 WPP		
	02 - Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilier pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Rasio kewirausahaan nasional		3,23 %		
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian		3,4—3,8 %		
		03 - Pertumbuhan PDB perikanan		5,00—7,00 %		
		04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan		5,4—5,8 %		
		05 - Kontribusi PDB industri pengolahan		19,9—20,5 %		
		06 - Nilai devisa pariwisata		7,38—13,08 miliar US\$		
		07 - Kontribusi PDB pariwisata		4,50 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Penyediaan lapangan kerja per tahun		2,7—3,0 juta orang		
		09 - Pertumbuhan investasi (PMTB)		6,2—7,0 %		
		10 - Pertumbuhan ekspor industri pengolahan		10,10 %		
		11 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa		7,2—7,9 %		
		12 - Tingkat inflasi umum		1,5—3,5 %		
		13 - Rasio perpajakan terhadap PDB		10,11 %		
		14 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja		3,7-4,5 %		
01.01 PP: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	2, 5	15,04 gigawatt	466.744,5	
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	2, 5	11,30 juta kilo liter		
01.01.01 KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2, 5	730,64 megawatt	448.086,3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.01.01.01 PRO-P: Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Air	2, 5	441,25 megawatt	448.086,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DAK
		02 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2, 5	55 megawatt		
		03 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2, 5	37,5 megawatt		
		04 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTS	2, 5	196,89 megawatt		
		05 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bayu	2, 5	0 megawatt		
01.01.02 KP: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	5	11,30 juta kilo liter	2.006,7	
01.01.02.01 PRO-P: Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	01 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	5	30 %	4.104.468,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN
01.01.03 KP: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas energi primer	2	133,8 SBM/miliar rupiah	10.123,8	
		02 - Penurunan intensitas energi final	2	0,8 SBM/miliar rupiah		
01.01.03.01 PRO-P: Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 %	10.123,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		02 - Jumlah kendaraan dinas listrik berbasis baterai	5	43.106 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.01.04 KP: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik	01 - Alokasi batu bara untuk kepentingan dalam Negeri (DMO) yang direncanakan	2, 5	181,28 juta ton	5.218,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2, 5	68 %		
01.01.04.01 PRO-P: Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 laporan	5.218,9	
		02 - Jumlah produksi gas bumi	2, 5	1.163 ribu BOPD		
01.01.05 KP: Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN sektor PLT Surya	2	40 %	1.308,9	
		02 - TKDN sektor PLT Bioenergi	2	40 %		
		03 - TKDN sektor PLT Panas Bumi	2	35 %		
01.01.05.01 PRO-P: Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan industri EBT	01 - TKDN sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 Indeks Skala 100	1.308,9	
01.02 PP: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (<i>water productivity</i>)	2	3,25 kg/m³	20.710.178,0	
01.02.01 KP: Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 juta ha	311.075,3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.01.01 PRO-P: Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5	7 ekoregion	18.203,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.01.02 PRO-P: Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	4.500 desa	292.871,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.02 KP: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,7 juta ha	79.295,5	
01.02.02.01 PRO-P: Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	5	30 juta m ³	23.711,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Produksi kayu terutama dari hutan produksi	5	60 juta m ³ /tahun		
01.02.02.02 PRO-P: Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	110 KPH	55.583,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.03 KP: Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	7.031 ha	482.876,2	
01.02.03.01 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	5	7.031 ha	482.876,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	5	181.826 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.04 KP: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	2,5 m³/detik	169.588,5	
01.02.04.01 PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	5	2,5 m³/detik	169.588,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
01.02.05 KP: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	475.000 ha	873.667,2	
01.02.05.01 PRO-P: Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang terrehabilitasi secara nasional	5	475.000 ha	865.010,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAK
01.02.05.02 PRO-P: Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi/ penyelamatan danau prioritas nasional	01 - Perbaikan kualitas danau prioritas nasional	5	15 danau prioritas	8.656,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.06 KP: Pengembangan Waduk Multiguna	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	18,08 miliar m³	18.793.675,4	
01.02.06.01 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	5	18 unit	18.770.675,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.06.02 PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi rencananya	5	13 unit	23.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya	5	6 unit		
01.03 PP: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	105,00—108,00	13.526.456,2	
		02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2.100,00 kkal/kapita/hari		
		03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57,00 gram/ kapita/hari		
		04 - <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5	5,00 %		
		05 - <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	5	4,00 %		
01.03.01 KP: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,7 kg/kapita/tahun	991.998,5	
		02 - Konsumsi protein asal ternak	5	13,3 gram/kapita/hari		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	316,3 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi ikan	5	59 kg/kapita/tahun		
		05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	90—95 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	5	200.000 ha		
		07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	100 % penerima BPNT		
		08 - Persentase pangsa pangan organik	5	20 %		
01.03.01.01 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	01 - Peningkatan konsumsi daging	5	2,1 %	38.797,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PANGAN NASIONAL
		02 - Peningkatan konsumsi protein asal ternak	5	0,9 %		
		03 - Peningkatan konsumsi sayur dan buah	5	5,0 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi kacang-kacangan	5	30,7 gram/kapita/hari		
01.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	95 %	317.291,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL
		02 - Persentase pangan hewani yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	90 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 VUB	305.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Produksi padi biofortifikasi	5	1.120 ribu ton GKG		
01.03.01.04 PRO-P: Pengembangan Pangan Organik	01 - Terlaksananya pengembangan pertanian organik	01 - Jumlah unit pengolah pupuk organik yang tersedia	5	750 unit	330.409,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02 KP: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Penggunaan benih bersertifikat	5	80,0 %	4.163.079,2	
		02 - Ketersediaan beras	5	46,84 juta ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,88 juta ton		
		04 - Produksi jagung	5	35,27 juta ton		
		05 - Produksi daging	5	4,7 juta ton		
		06 - Produksi umbi-umbian	5	25,5 juta ton		
		07 - Produksi sayuran	5	16,00 juta ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	30,88 juta ton		
01.03.02.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Padi	01 - Meningkatnya produksi padi	01 - Pertumbuhan produktivitas padi	5	3,00 %	1.171.809,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	5	5,00 %		
01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Pertumbuhan produktivitas jagung	5	1,20 %	455.507,1	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
01.03.02.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Pertumbuhan produktivitas kedelai	5	1,10 %	4.224,7	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Peningkatan produksi daging	5	2,0 juta ton	1.976.951,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Pertumbuhan produktivitas sayuran	5	5,07 %	530.917,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan produktivitas buah- buahan	5	2,20 %		
01.03.02.06 PRO-P: Peningkatan Produksi Umbi-Umbian	01 - Meningkatnya produksi umbi-umbian	01 - Pertumbuhan produktivitas ubi kayu	5	1,50 %	23.669,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Pertumbuhan produktivitas ubi jalar	5	3,52 %		
01.03.03 KP: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	80—95 %	7.165.183,9	
		02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	59,8 juta rupiah/tenaga kerja/tahun		
01.03.03.01 PRO-P: Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Luas area yang difasilitasi asuransi usaha tani padi	5	1.000.000 ha	187.165,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah ternak yang difasilitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	225.000 ekor		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.03.02 PRO-P: Pendidikan Pertanian	01 - Terlaksananya pendidikan pertanian	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian	1	92 %	409.222,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.03.03 PRO-P: Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	1	100 %	273.897,3	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	22 %		
01.03.03.04 PRO-P: Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	5	350 unit	6.294.899,2	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
01.03.04 KP: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatnya produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	100 %	485.617,6	
		02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	30 dan 8 varietas unggul baru dan galur		
01.03.04.01 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Luasan rehabilitasi jaringan irigasi	5	269.884 ha	217.024,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.04.02 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Luas lahan sawah yang ditetapkan LP2B tiap tahunnya	5	7.463.948 ha	243.294,9	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.04.03 PRO-P: Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Meningkatnya varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	30 dan 8 varietas unggul baru dan galur	25.297,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.04.04 PRO-P: Peningkatan sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	01 - Meningkatnya sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	01 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4.250 aksesi	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.05 KP: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Meningkatnya tata kelola sistem pangan nasional	01 - <i>Global food security index</i>	5	69,8	720.577,1	
01.03.05.01 PRO-P: Stabilisasi Harga Pangan	01 - Stabilitasnya harga pangan strategis	01 - Koefisien varian harga pangan	5	2,00 %	19.055,2	BADAN PANGAN NASIONAL
01.03.05.02 PRO-P: Penanganan Rawan Pangan	01 - Menurunnya daerah rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	10 %	34.387,6	BADAN PANGAN NASIONAL
01.03.05.03 PRO-P: Penguatan Cadangan Pangan Nasional	01 - Menguatnya cadangan pangan nasional	01 - Cadangan beras	5	6—10 Juta ton	667.134,4	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN PANGAN NASIONAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04 PP: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	29,30 juta ha	3.202.772,9	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤80 %		
		03 - Produksi perikanan	5	30,85 juta ton		
		04 - Produksi garam	5	2,00 juta ton		
		05 - Nilai tukar nelayan	5	107,00-110,00		
01.04.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 unit	256.468,0	
		02 - Akurasi pendataan stok dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	12 RZ		
01.04.01.01 PRO-P: Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan WPP yang melaksanakan penangkapan terukur	4	11 WPP	15.050,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.01.02 PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	16 RZ	23.235,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.01.03 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	5	40 lokasi	218.183,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.02 KP: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	17.891.741 ha	23.215,0	
01.04.02.01 PRO-P: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	10 kawasan	20.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Marine Bioproduct dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan marine bioproduct dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	2 paket	2.715,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03 KP: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	18,52 juta ton	2.502.723,0	
		02 - Produksi rumput laut	5	12,33 juta ton		
		03 - Produksi garam	5	2,00 juta ton		
01.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	6,00 juta ton	2.346.367,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
		02 - Produksi ikan budidaya	5	12,52 juta ton		
		03 - Kawasan klaster sentra produksi perikanan budidaya unggulan	5	50 klaster		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	12,33 juta ton	34.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	2,00 juta ton	54.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.04 PRO-P: Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Rasio pengendalian ekspor, impor, dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi di <i>exit/entry point</i>	5	100 %	67.655,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.04 KP: Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatnya fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	10,80 triliun rupiah	185.326,6	
		02 - Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	5	105		
01.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	500 orang	13.825,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.04.02 PRO-P: Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya	5	13.000 bidang	136.229,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.04.03 PRO-P: Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat- daerah	4	37 provinsi	35.271,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	5	98 %		
01.04.05 KP: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya SDM dan inovasi teknologi kemaritiman dan kelautan serta database kelautan	01 - Jumlah percontohan adopsi teknologi di sentra kelautan dan perikanan	5	19 lokasi	235.040,4	
		02 - Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	5	82.173 orang		
01.04.05.01 PRO-P: Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	47.000 kelompok masyarakat	183.277,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang dilatih	5	35.173 orang		
01.04.05.02 PRO-P: Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Jumlah model teknologi yang diterapkan di sentra kelautan dan perikanan	5	5 model	51.762,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.05 PP: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	22,00 %	2.271.146,2	
		02 - Pertumbuhan wirausaha	1	2,90 %		
		03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	1, 5	5,50 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.01 KP: Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	1, 5	10,50 %	583.800,6	
		02 - IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	5	200 IKM (kumulatif)		
01.05.01.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	1, 5	15.000 UMKM	473.552,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN) (Terintegrasi dengan PSN)
01.05.01.02 PRO-P: Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	1, 5	1.000 UMKM	48.778,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN KEUANGAN
01.05.01.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	1, 5	7.500 UMKM	61.470,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	1, 5	30,78 %	50.655,8	
		02 - Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	5	5,00 %		
		03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	80,00 %		
		04 - Nilai penyaluran KUR	5	325,00 Rp Triliun		
01.05.02.01 PRO-P: Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	3.000 orang	20.737,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
01.05.02.02 PRO-P: Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	10.000 UMKM	26.203,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.05.02.03 PRO-P: Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	150 UMKM	3.714,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03 KP: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	500 unit (kumulatif)	76.664,2	
01.05.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	1, 5	6.000 orang	46.525,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.03.02 PRO-P: Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	1, 5	685 orang/kelompok masyarakat/koperasi	2.694,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	900 koperasi	21.250,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	800 koperasi	6.194,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.04 KP: Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	01 - Meningkatnya penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	01 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	20,0 %	1.533.795,7	
		02 - Penumbuhan <i>start-up</i>	5	3.500 <i>start-up</i> (kumulatif)		
		03 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	20.000 WUB		
01.05.04.01 PRO-P: Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	1, 5	30000 orang	436.910,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.04.02 PRO-P: Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	1, 5	5.300 wirausaha/ start-up/UMKM	37.468,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.05.04.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	3.200 UMKM	530.175,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
01.05.04.04 PRO-P: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra industri kecil dan menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	44 sentra IKM (kumulatif)	507.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, DAK
01.05.04.05 PRO-P: Pembinaan Wirausaha Mapan	01 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan	01 - Jumlah wirausaha mapan yang terbentuk	1, 5	200 orang	21.741,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
	02 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan yang memperoleh dukungan akses pasar	01 - Jumlah wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar	1, 5	180 UMKM		
01.05.05 KP: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,4 %	26.230,0	
01.05.05.01 PRO-P: Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah wirausaha sosial yang dibina	5	540 orang	5.300,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.05.02 PRO-P: Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	01 - Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan	01 - Jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan yang dibina	1, 5	13.000 orang/wirausaha	20.930,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.06 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5	5,80—6,20 %	7.691.252,4	
		02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	5	17,90—18,20 %		
		03 - Nilai tambah ekonomi kreatif	5	1.347,0 triliun rupiah		
		04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	5	22,50 juta orang		
		05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	5	15,70 %		
		06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata	5	22,08 juta orang		
		07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	5	24,70 juta orang		
		08 - Nilai realisasi PMA dan PMDN	5	1.450—1.650 triliun rupiah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.01 KP: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	5	662,7—754,1 triliun rupiah	1.409.563,1	
		10 - Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	5	3,60—3,80 %		
		01 - Pertumbuhan PDB perkebunan	5	5,00 %		
		02 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	6,00 %		
01.06.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	03 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	5	5,60—6,00 %	324.761,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		04 - Pertumbuhan PDB subsektor industri alat angkutan	5	6,3—7,0 %		
		01 - Peningkatan produksi kakao	5	2,7 %		
		02 - Peningkatan produksi kopi	5	1,5 %		
		03 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	6,00 %		
		04 - Peningkatan produksi kelapa	5	0,9 %		
		05 - Peningkatan produksi karet	5	1,9 %		
		06 - Peningkatan produksi sagu	5	4,9 %		
		07 - Peningkatan produksi tebu	5	1,5 %		
		08 - Peningkatan produksi lada	5	0,4 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	09 - Peningkatan produksi pala	5	0,1 %	374.763,9	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
		10 - Peningkatan produksi cengkeh	5	0,1 %		
		01 - Peningkatan produksi sayuran	5	3,1 %		
		02 - Peningkatan produksi buah- buahan	5	5,7 %		
		03 - Peningkatan produksi florikultura	5	5.5 %		
01.06.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Pertumbuhan PDB industri furnitur	5	5,00—5,30 %	50.705,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.06.01.04 PRO-P: Pengembangan Industri Kemaritiman	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	01 - Pertumbuhan PDB perikanan	5	5,00—7,00 %	176.912,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.06.01.05 PRO-P: Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam	01 - Pertumbuhan PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional	5	4,80—5,20 %	111.920,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
01.06.01.06 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Transportasi	01 - Terlaksananya pengembangan industri alat transportasi	01 - Produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat atau lebih	5	14.000 unit	370.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
		02 - Produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua atau tiga	5	1.000.000 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.02 KP: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	5	17 KI-KEK industri	81.740,6	
01.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	5	7,30—7,90 %	35.266,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Terintegrasi dengan PSN)
01.06.02.02 PRO-P: Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks Pasokan Mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	5	79,42 %	46.474,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
		02 - Rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara	5	50 %		
01.06.03 KP: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5	10 destinasi	4.134.918,0	
		02 - Revitalisasi destinasi Bali	5	1 destinasi		
		03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	5	25 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Destinasi wisata berbasis <i>geopark</i>	5	16 destinasi		
		05 - Destinasi wisata bahari	5	6 destinasi		
01.06.03.01 PRO-P: Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 destinasi	66.300,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.06.03.02 PRO-P: Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya	5	10 destinasi	3.737.883,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.03.03 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 destinasi/provinsi	164.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAK
01.06.03.04 PRO-P: Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	5	3 destinasi	157.439,1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAK
01.06.03.05 PRO-P: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark	01 - Terlaksananya pengembangan 16 <i>geopark</i> untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah koordinasi pengembangan <i>geopark</i>	5	1 kegiatan	8.795,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
01.06.04 KP: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	5,32 %	267.533,4	
		02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	9,28—11,63 %		
01.06.04.01 PRO-P: Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand	01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	4	3 skema	71.590,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.02 PRO-P: Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	5	5.500 kegiatan	16.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.04.03 PRO-P: Fasilitas Rantai Pasok dan Scale-up Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya fasilitas rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	01 - Jumlah fasilitas rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	5	100 kerja sama	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.04 PRO-P: Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	01 - Jumlah kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	5	7 kab/kota	87.400,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		02 - Jumlah kawasan dan kluster kreatif yang dikembangkan	5	21 kawasan		
		03 - Revitalisasi ruang kreatif	5	21 unit		
		04 - Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Infrastruktur	5	1.200 orang		
01.06.04.05 PRO-P: Pengembangan 'Start- Up Parks' dan Center of Excellence	01 - Terlaksananya pengembangan 'start-up parks' dan center of excellence	01 - Jumlah 'Start-Up Parks' dan Center of Excellence yang dikembangkan	5	1 kerja sama	13.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.06 PRO-P: Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	01 - Jumlah pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	5	600 kegiatan	47.510,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.07 PRO-P: Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan Be Creative District (BCD)	01 - Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) yang dikembangkan	5	1 kegiatan	25.032,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.05 KP: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	01 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	5	50,5 %	1.729.895,4	
		02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5	52,5 %		
		03 - Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran	1	70 %		
01.06.05.01 PRO-P: Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan harmonisasi regulasi terkait perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah	5	2 rekomendasi kebijakan	69.976,9	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.05.02 PRO-P: Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III, IV, dan V	5	85 perusahaan	630.427,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.03 PRO-P: Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Perusahaan besar dan menengah yang mendapatkan pemahaman tata cara pengesahan e-PP	5	1.800 badan usaha	1.029.491,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
	02 - Meningkatkan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	01 - Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di kawasan Asia dan Afrika	1	257.550 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di kawasan Amerika dan Pasifik	1	14.250 orang		
		03 - Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di kawasan Eropa dan Timur Tengah	1	28.800 orang		
01.06.06 KP: Pengembangan Industri Halal	01 - Terlaksananya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	3 sektor industri	67.601,9	
01.06.06.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Industri Halal	01 - Tersedianya regulasi dan fasilitasi usaha bagi penguatan industri halal	01 - Kebijakan pemberdayaan industri halal	5	1 rekomendasi kebijakan	24.762,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan	5	1.010.000 sertifikat		
01.06.06.02 PRO-P: Penguatan Pelaku Industri Halal	01 - Terselenggaranya fasilitasi pemerintah untuk penguatan pelaku industri halal	01 - Jumlah industri halal yang difasilitasi dan dibina	5	6.070 industri/lembaga	25.721,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.06.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Beroperasinya kawasan industri tematik halal	01 - Jumlah kawasan industri tematik halal yang beroperasi	5	5 lokasi	7.925,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.06.06.04 PRO-P: Kerjasama Internasional Industri Halal	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor dan kerja sama internasional terkait industri halal	01 - Jumlah promosi produk industri halal berskala internasional	5	7 kegiatan promosi	9.193,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.06.05 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Halal	01 - Terlaksananya pengembangan pariwisata halal	01 - Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi terkait industri halal dan ekonomi syariah	5	275 UMKM	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.06.06 PRO-P: Penguatan Halal Value Chain	01 - Penguatan klasterisasi dan industrialisasi produk halal dalam proses hilirisasi	01 - Jumlah fasilitasi kerja sama industri dalam rangka rantai nilai dan rantai pasok halal	5	2 kegiatan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.06.07 PRO-P: Pengembangan Data Industri Halal	01 - Tersedianya basis data industri halal	01 - Jumlah basis data industri halal	5	1 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07 PP: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan barang	5	47,2—49,5 US\$ miliar	4.410.636,2	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	4,5—6,8 %		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	9,50—14,30 juta kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	1.250—1.500 juta perjalanan		
		05 - Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	5	11,50 %		
01.07.01 KP: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	183,1 miliar US\$	3.837.712,9	
		02 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	83,38 %		
		03 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	13,0 %		
		04 - Ekspor hasil pertanian (fob)	5	5,5 miliar US\$		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0—10,0 %		
		06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	10,50 miliar US\$		
		07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	1,8—1,9 %		
		08 - Nilai ekspor produk rempah-rempah	5	2.180,73 juta US\$		
		09 - Nilai ekspor hasil perikanan	5	7,20 miliar US\$		
01.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	40 perusahaan	8.246,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	5	190 produk	50.938,6	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07.01.03 PRO-P: Perluasan Ekspor Gastronomi Indonesia <i>Spice Up The World</i>	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah restoran Indonesia di Luar Negeri	5	4.000 Unit	3.778.528,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.02 KP: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	223 negara	166.464,5	
		02 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	2,80 %		
		03 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	4,20 %		
01.07.02.01 PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	5	72 kegiatan	133.480,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.02.02 PRO-P: Fasilitas Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitas ekspor	01 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	5	1.009.022 badan usaha	23.866,6	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.07.02.03 PRO-P: Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	51,53 miliar US\$	9.117,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
		02 - Nilai ekspor produk industri sektor agro	5	72,59 miliar US\$		
		03 - Nilai ekspor produk industri IKFT	5	43,15 miliar US\$		
		04 - Nilai ekspor produk industri aneka	5	13,54 miliar US\$		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.03 KP: Pengelolaan Impor	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	5	53,00 %	55.106,4	
01.07.03.01 PRO-P: Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan <i>post border</i>	5	3.192 produk	55.106,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.04 KP: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	5	8.400 produk (kumulatif)	159.351,9	
		02 - Capaian TKDN Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	5	50 % (kumulatif)		
01.07.04.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	02 - Jumlah produk yang masuk dalam <i>E-Katalog</i>	5	10.000.000 produk	159.351,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
		03 - Sistem <i>E-Purchasing</i> terintegrasi	4, 5	1 sistem informasi		
01.07.05 KP: Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	5	2 kesepakatan	15.250,0	
01.07.05.01 PRO-P: Peningkatan Investasi (<i>Inbound & Outbound</i>) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (<i>inbound</i> dan <i>outbound</i>) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam <i>global value chain</i>	5	7 badan usaha	15.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



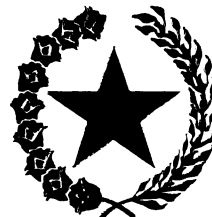
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.06 KP: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi <i>Branding</i> , dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif	01 - Jumlah <i>branding wonderful Indonesia</i>	5	10 destinasi <i>branding</i>	70.119,0	
		02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	27,53 miliar US\$		
		03 - Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (<i>cultural heritage regeneration</i>)	5	0 lokasi		
01.07.06.01 PRO-P: <i>Branding Wonderful Indonesia</i>	01 - Terlaksananya <i>branding Wonderful Indonesia</i>	01 - Jumlah media <i>branding</i>	5	4 media	0,0 (<i>multitagging</i>)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.06.02 PRO-P: Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	3 regional pemasaran	64.619,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.06.03 PRO-P: Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui <i>e-Commerce</i>	01 - Terlaksananya perluasan pemasaran produk kreatif, termasuk melalui <i>e- commerce</i>	01 - Jumlah pendukung/fasilitasi pada pelaku ekonomi kreatif	5	19 promosi	0,0 (<i>multitagging</i>)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.06.04 PRO-P: Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1, 5	13.000 orang	5.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.07 KP: Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	01 - Meningkatnya efektivitas <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive</i> <i>Economic Partnership</i> <i>Agreement</i> (CEPA) dan diplomasi ekonomi	01 - Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan	5	97,57 %	106.631,5	
		02 - Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata	5	92,07 %		
		03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	5	4 ratifikasi		
		04 - Jumlah promosi <i>Tourism, Trade,</i> <i>and Investment</i> (TTI) terintegrasi	5	8 promosi terintegrasi		
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	40 (kumulatif) kesepakatan		
01.07.07.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	200 orang	2.182,2	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.07.02 PRO-P: Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	5	122 dokumen kesepakatan/perund ingan	81.812,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.07.03 PRO-P: Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	11 pameran	22.637,2	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08 PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	3,0—5,0 %	3.034.069,2	
		02 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,57—4,58 %		
		03 - Rasio uang beredar M2/PDB	5	50,5—51,2 %		
		04 - Skor <i>logistic performance index</i>	5	3,5		
		05 - Peringkat <i>travel and tourism development index</i>	5	N/A		
		06 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	5	100,00 %		
		07 - Imbal hasil (yield) surat berharga negara	5	menurun %		
		08 - Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat	5	34,94 %		
		09 - Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	5	8 <i>database</i>		
01.08.01 KP: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio kredit/PDB	5	34,3—35,1 %	4.347,9	
		02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 penduduk dewasa	5	57,3 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk dewasa	5	15,3 unit		
		04 - Skema pembiayaan berbasis HKI	5	1 skema		
01.08.01.01 PRO-P: Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Indeks Inklusi Keuangan	5	90 %	1.140,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
01.08.01.02 PRO-P: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah	01 - <i>Turnover</i> rasio SBN	5	5,11 %	2.299,3	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.01.03 PRO-P: Pengembangan Jasa Keuangan Syariah	01 - Terlaksananya pengembangan jasa keuangan syariah	01 - Market share keuangan syariah terhadap keuangan nasional	5	11—12 %	907,9	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.02 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	6,77 %	141.236,0	
		02 - Nilai transaksi <i>e-commerce</i>	5	1.031,6 triliun rupiah		
01.08.02.01 PRO-P: Penguatan Industri Fintech, <i>e-Commerce</i> , <i>On-Demand Service</i> , dan <i>Internet Of Things</i>	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	5	200 orang	12.861,0	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (FP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.02.02 PRO-P: Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness</i> <i>Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	5	60 perusahaan	128.375,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.08.03 KP: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	01 - <i>Skor logistic performance index</i>	5	3,5	1.815.100,7	
01.08.03.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	66 unit	1.804.862,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, DAK, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
01.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Inflasi Pangan	01 - Terjaganya harga bahan pangan	01 - Koefisien Varian Harga Pangan	5	2,00 %	10.238,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, BADAN PANGAN NASIONAL
		02 - Cadangan Beras	5	6-10 Juta Ton		
		03 - Persentase Peraturan Impor Bahan Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Nasional	5	100 %		
		04 - Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	5	5,90 %		
		05 - Persentase Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional	5	95,00 %		
		06 - Persentase Tingkat Penggunaan Barang Dalam Negeri yang Diperdagangkan di Toko Swalayan	5	85,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.04 KP: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	7 %	59.390,0	
		02 - Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	5	10 lokasi		
01.08.04.01 PRO-P: Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	5	10 destinasi	59.390,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.08.05 KP: Reformasi Fiskal	01 - Terlaksananya reformasi fiskal	01 - Persentase realisasi penerimaan negara	5	100 %	332.247,7	
01.08.05.01 PRO-P: Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah proses bisnis <i>core tax system</i>	5	4 dokumen (<i>support dan project closure report</i>) proses bisnis	312.307,2	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.03 PRO-P: Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan	01 - Terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	01 - Persentase terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	5	100 %	19.940,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.04 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembayaran	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pembayaran	01 - Persentase terlaksananya pengembangan sistem pembayaran	5	100 %	0,0 (<i>multitagging</i>)	KEMENTERIAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.06 KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	3 <i>database</i>	681.746,9	
		02 - Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	3 <i>database</i>		
		03 - Ketersediaan data statistik disagregasi PMTB	5	1 <i>database</i>		
		04 - Pelaksanaan sensus ekonomi 2026	5	1 <i>database</i>		
01.08.06.01 PRO-P: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	3 <i>database</i>	234.405,1	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.08.06.03 PRO-P: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksananya sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	3 <i>database</i>	421.044,4	BADAN PUSAT STATISTIK
01.08.06.04 PRO-P: Penyediaan Data Disagregasi PMTB	01 - Terlaksananya penyediaan data disagregasi PMTB	01 - Jumlah publikasi/laporan disagregasi PMTB	5	1 <i>database</i>	8.681,4	BADAN PUSAT STATISTIK



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.06.06 PRO-P: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026	01 - Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026	01 - Jumlah publikasi/laporan persiapan dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026	5	1 <i>database</i>	17.616,0	BADAN PUSAT STATISTIK

KETERANGAN

Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

CATATAN:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.



PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 PN: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	01 - Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI		6,0—6,9 % per tahun	61.901.400,4	
		02 - IPM KTI		62,46—78,80 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KTI		9,00—9,50 %		
	02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI		5,2—5,5 % per tahun		
		02 - IPM KBI		71,23—82,57 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KBI		7,00—7,50 %		
02.01 PP: Pembangunan Wilayah Sumatera	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	4,8—5,2 % per tahun	9.997.163,4	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	1	71,23—77,23 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	1	7,50—8,30 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	988.869,3	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	26 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	2 destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	6 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	14 KI		
		07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	5	2 kawasan		
02.01.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	300,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.02 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	7.950,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.03 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	52.801,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.01.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang- Bukittinggi	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.01.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1	23.480,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.06 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	870.154,8	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.01.07 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.08 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	7.062,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.01.01.09 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Kemingking	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI Kemingking	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jambi	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.10 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI Bintan Aerospace	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.11 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI Sadai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.12 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Sabang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	19.317,9	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
02.01.01.13 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.14 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Batam Aero Technic	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Batam Aero Technic	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.15 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	802,9	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.01.01.16 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanjung Buton	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Tanjung Buton	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.17 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanjung Enim	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Tanjung Enim	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.18 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanggamus	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Tanggamus	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.19 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pesawaran	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Pesawaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.20 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Way Pisang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Way Pisang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.21 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Katibung	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Katibung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.22 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ladong	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ladong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.23 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Kuala Tanjung	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Kuala Tanjung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %	40.411,4	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	-18,75 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	131,81 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	0 % ^(a)		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	-14,68 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	1,5 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	35,19 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	0 % ^(a)		
02.01.02.02 PRO-P: Pengembangan komoditas unggulan Garam di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh - garam	5	35,19 %	320,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - pala	5	-19,99 %	1.958,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - cengkeh	5	0 % ^(a)		
02.01.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh - perikanan budidaya	5	76,28 %	541,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kelapa	5	0 % ^(a)	3.335,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - perikanan budidaya	5	101,14 %	150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - perikanan budidaya	5	167,13 %	0,0 <i>(multitagging)</i>	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - tebu	5	1,5 %	2.813,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.42 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - perikanan budidaya	5	351,65 %	150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.53 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - tebu	5	1,5 %	2.842,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.54 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan tangkap	5	-18,75 %	7.577,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.55 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan budidaya	5	109,64 %	150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.56 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - lada	5	0,00 % ^(a)	2.737,9	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.62 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.089,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.65 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kelapa	5	0,1 %	1.629,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.66 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kelapa	5	0,1 %	602,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.69 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - kelapa	5	0,02 %	1.391,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.70 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - pala	5	0,00 % ^(a)	708,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - cengkeh	5	0,00 % ^(a)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.71 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - pala	5	0,00 % ^(a)	789,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - lada	5	0,00 % ^(a)		
02.01.02.75 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kelapa	5	0,01 %	638,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.86 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - kelapa	5	0,04 %	671,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.87 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - kelapa	5	0,03 %	850,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.95 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu - perikanan tangkap	5	-18,75 %	3.899,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.96 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.621,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.97 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara- cengkeh	5	0,00 % (a)	280,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.99 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - perikanan tangkap	5	-18,75 %	814,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.100 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.902,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.101 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan- perikanan tangkap	5	-18,75 %	944,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (Angka perhitungan sementara)	5	76,93	3.533.119,9	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (Angka perhitungan sementara)	5	71,43		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (Angka perhitungan sementara)	5	62,50		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (Angka perhitungan sementara)	5	71,51		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (Angka perhitungan sementara)	5	69,98		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (Angka perhitungan sementara)	5	75,95		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (Angka perhitungan sementara)	5	70,20		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (Angka perhitungan sementara)	5	57,46		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (Angka perhitungan sementara)	5	74,22		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (Angka perhitungan sementara)	5	70,77		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (Angka perhitungan sementara)	5	80,67		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (Angka perhitungan sementara)	5	72,48		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (Angka perhitungan sementara)	5	76,71		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (Angka perhitungan sementara)	5	78,77		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (Angka perhitungan sementara)	5	68,51		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (Angka perhitungan sementara)	5	66,75		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (Angka perhitungan sementara)	5	70,13		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (Angka perhitungan sementara)	5	75,29		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (Angka perhitungan sementara)	5	73,15		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (Angka perhitungan sementara)	5	71,40		
		21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (Angka perhitungan sementara)	5	72,21		
		22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (Angka perhitungan sementara)	5	78,08		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.01.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 kota	23.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.03 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	2.663.806,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	18.899,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.10 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota	13.397,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.03.11 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	306.366,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.01.03.12 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	507.649,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.01.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Sumatera	1, 5	62,10	4.942.191,0	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	62,27		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	63,81		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan wilayah Sumatera	1	9,50—9,70 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	2 kabupaten		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	56 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,54		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Aceh	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Aceh	1, 5	61,00	3.925.491,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.08 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	1, 5	68,51	101.084,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.09 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	61,69	1.564,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.10 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	4 kecamatan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,52	5.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Utara	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara	1, 5	56,90	139.511,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Samosir	1, 5	68,72	18.330,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.14 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	5	2 kecamatan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.15 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	17,7 - 18,2 %	67.642,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	64,9 - 65,4		
02.01.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Barat	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat	1, 5	70,25	52.363,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.17 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	1, 5	58,7	14.841,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.18 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	76,10	1.474,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.19 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	11,0 - 11,5 %	195.763,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	63,2 - 63,7		
02.01.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Riau	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Riau	1, 5	65,75	35.339,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.21 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	5	15 kecamatan	22.399,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.01.04.22 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis	5	0,59	15.217,1	DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Jambi	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jambi	1, 5	65,10	48.080,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	1, 5	59,20	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	37,47	3.276,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan	1, 5	64,90	45.377,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.27 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	1, 5	64,33	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.28 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	64,97	1.407,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.29 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	17,6 - 18,1 %	22.260,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	67,5 - 68,0		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.30 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Bengkulu	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bengkulu	1, 5	60,80	28.873,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.31 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah	1, 5	57,30	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.32 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	76,46	3.354,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.33 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Lampung	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Lampung	1, 5	66,50	32.900,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.34 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang Bawang	1, 5	63,35	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.35 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	59,63	5.192,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.36 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	13,2 - 13,7 %	23.299,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	67,6 - 68,1		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.37 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1, 5	74,00	39.420,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.38 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	1, 5	56,95	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.39 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	76,49	2.143,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.40 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Riau	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Riau	1, 5	65,85	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.41 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun	1, 5	60,72	25.511,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.42 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	5	35 kecamatan	54.626,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.01.04.43 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,52	10.445,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.01.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	8.762.180 ha	492.571,9	
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	5.092.807 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	24 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	34 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	16 materi teknis dan Ranperda RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	10 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
		08 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,3		
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	56,3 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	164 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	164 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	17.743 dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	21 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien .	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	164 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	4	12 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
02.01.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.924 dokumen	104.568,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	24 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	24 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	24 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	78.894 bidang	32.257,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	44.150 ha		
02.01.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	7.720,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.694 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %	63.560,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	45 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	34 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	34 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	34 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	100.872 bidang	63.560,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	118.577 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.10 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.228 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	93 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	20 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	20 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	20 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	82.228 bidang	71.538,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	177.845 ha		
02.01.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.964 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	51 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	52.727 bidang	62.097,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	203.676 ha		
02.01.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	7.620,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	718 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	50 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertipikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	6.060 bidang	4.473,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	5.356 ha		
02.01.05.19 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.335 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	78 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.20 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya percepatan sertipikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	37.715 bidang	35.749,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	100.147 ha		
02.01.05.22 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	2.459 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	58 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	18 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertipikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	50.228 bidang	18.059,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	26.636 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.25 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.076 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	49 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.26 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya percepatan sertipikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	60.591 bidang	52.298,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	129.386 ha		
02.01.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.800,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.01.05.28 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.625 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	54 %	15.550,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.29 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya percepatan sertipikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	20.785 bidang	15.550,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	25.830 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.30 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	4.910,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.31 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	720 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	49 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.32 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya percepatan sertipikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	11.620 bidang	10.369,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	19.579 ha		
02.02 PP: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	5,3—5,6 % per tahun	8.982.063,1	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	1	73,65—82,57 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	1, 5	7,00—7,50 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	490.719,8	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	18 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	4 destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	3 destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	6 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI Pengembangan	5	5 KI		
02.02.01.01 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon- Halimun-Bandung- Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun- Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01.02 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	2.738,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.03 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	281.603,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.02.01.04 PRO-P: Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.02.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo- Tengger-Semeru	01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	145.952,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01.06 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.07 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.02.01.08 PRO-P: Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.02.01.09 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon- Halimun-Bandung- Pangandaran di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun- Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01.11 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Subang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Subang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.12 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.01.13 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.14 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Lido	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Lido	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.02.01.15 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	59.943,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.01.16 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01.17 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Brebes	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Brebes	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.18 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bangkalan	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Bangkalan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.19 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Sanur	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Sanur	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1	482,3	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
02.02.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %	107.729,2	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	1,5 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	-5,41 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	-18,75 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	104,98 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	184,89 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	-11,68 %		
02.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - pala	5	-14,00 %	2.836,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - cengkeh	5	-1,54 %		
02.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kelapa	5	0,15 %	1.342,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - tebu	5	1,5 %	4.394,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - garam	5	321,08 %	4.063,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.06 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - tebu	5	1,5 %	5.396,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - garam	5	146,12 %	12.801,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - tebu	5	1,5 %	668,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.10 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - tebu	5	1,5 %	10.736,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - garam	5	181,51 %	2.683,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kelapa	5	0,08 %	1.570,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - perikanan tangkap	5	-18,75 %	814,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.18 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan tangkap	5	-18,75 %	2.147,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan budidaya	5	130,26 %	16.600,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.20 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan tangkap	5	-18,75 %	2.806,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.21 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan budidaya	5	121,61 %	150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.22 PRO-P: Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - perikanan budidaya	5	130,53 %	300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.399,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.24 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan budidaya	5	66,05 %	21.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.26 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.727,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - perikanan budidaya	5	409,75 %	950,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi DIY	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DIY - garam	5	773,36 %	1.670,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.29 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - Garam	5	150,75 %	320,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - cengkeh	5	-0,83 %	1.734,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - pala	5	-2,01 %		
02.02.02.33 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - kelapa	5	0,3 %	3.929,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.39 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - cengkeh	5	-14,79 %	2.064,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.40 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - kelapa	5	0,04 %	2.062,5	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.42 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - cengkeh	5	0,00 % ^(a)	248,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.43 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - kelapa	5	0,08 %	796,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.44 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - cengkeh	5	-0,06 %	515,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (angka perhitungan sementara)	5	77,50	6.745.564,0	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (angka perhitungan sementara)	5	70,82		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (angka perhitungan sementara)	5	76,76		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (angka perhitungan sementara)	5	70,29		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (angka perhitungan sementara)	5	75,22		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (angka perhitungan sementara)	5	84,61		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (angka perhitungan sementara)	5	81,41		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (angka perhitungan sementara)	5	66,79		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (angka perhitungan sementara)	5	77,66		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (angka perhitungan sementara)	5	82,49		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (angka perhitungan sementara)	5	72,32		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (angka perhitungan sementara)	5	78,82		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (angka perhitungan sementara)	5	79,55		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (angka perhitungan sementara)	5	77,02		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (angka perhitungan sementara)	5	74,11		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (angka perhitungan sementara)	5	74,99		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (angka perhitungan sementara)	5	63,01		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (angka perhitungan sementara)	5	74,71		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (angka perhitungan sementara)	5	70,97		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (angka perhitungan sementara)	5	83,30		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.02.03.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.207.814,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.370.190,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.03.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	65.658,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.09 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	2.933.707,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.03.10 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 kota	525.830,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.11 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	17.869,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.12 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	57.878,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.13 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	5	5 kota	2.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.15 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	3.286,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.17 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	15.650,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.03.18 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	545.678,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu dan Kawasan Perdesaan	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Jawa-Bali	1, 5	71,68	763.236,2	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	66,77		
		03 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Jawa-Bali	1, 5	10,50—10,90 %		
		04 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	100 %		
02.02.04.04 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Barat	1, 5	74,15	112.018,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.05 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah	1, 5	73,25	94.172,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi DI Yogyakarta	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi DI Yogyakarta	1, 5	80,10	32.128,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Timur	1, 5	73,50	303.129,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Banten	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Banten	1, 5	67,10	38.536,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.09 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bali	1, 5	77,90	31.970,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.10 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	1, 5	57,72	14.477,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.11 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	1, 5	67,05	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.12 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Banyuwangi	1, 5	84,50	71.800,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	1, 5	77,55	42.067,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.14 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Klungkung	1, 5	72,04	450,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.15 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	100 %	22.485,9	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.02.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,60	874.813,9	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	77,4 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	129 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	129 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	11.658 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	23 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	129 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	4	12 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	3.641.784 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.412.410 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	54 materi teknis dan Ranperkada RDTR	44.645,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	36 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	9 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	8 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	20 perkara		
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan		
	02.02.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	4	377 dokumen		
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	100 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	1 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	1 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	1 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terlaksananya percepatan peta dasar pertanahan	01 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	505.182 ha	72.873,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.036 dokumen	1.360,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	65 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	28 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	28 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	28 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	1.135.711 bidang	214.508,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	113.787 ha		
02.02.05.10 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya layanan data center	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan	72.812,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.02.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.953 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kera sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	75 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	36 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	36 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	36 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.12 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	814.288 bidang	175.917,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	109.107 ha		
02.02.05.13 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	1.000,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	11 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.15 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	752 dokumen	347,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	86 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi		
02.02.05.16 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	8.838 bidang	6.195,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	10.742 ha		
02.02.05.18 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3495 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	92 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	39 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	39 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	39 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.19 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	991.337 bidang	233.097,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	209.170 ha		
02.02.05.22 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.073 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	58 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	• 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	146.428 bidang	45.796,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	98.392 ha		
02.02.05.26 PRO-P: Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	972 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	66 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.27 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	18.000 bidang	6.259,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	9.072 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03 PP: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	4,1—4,9 % per tahun	2.797.585,7	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	1	66,58—70,56 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara	1	14,50—15,00 %		
02.03.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	88.226,4	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
02.03.01.01 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok- Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1	57.606,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.01.02 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1	30.620,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.01.03 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.03.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	3,60 %	50.099,6	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	2,88 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	-18,75 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	53,63 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	65,31 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kelapa	5	0,08 %	836,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - garam	5	3.067,78 %	13.510,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kopi	5	3,74 %	1.740,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kelapa	5	0,08 %	2.321,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - garam	5	-80,13 %	2.433,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - perikanan budidaya	5	46,99 %	16.550,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan tangkap	5	-18,75 %	4.292,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan budidaya	5	63,43 %	5.650,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.13 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kakao	5	2,78 %	438,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - perikanan tangkap	5	-18,75 %	2.327,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara)	5	71,31	1.552.625,7	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara)	5	70,34		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota		
02.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	1.552.625,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
02.03.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Nusa Tenggara	1, 5	59,98	983.499,9	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	59,94		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	53,09		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan wilayah Nusa Tenggara	1	19,10—19,40 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	7 kabupaten		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	38 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52 IPKP		
		04 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	100 %		
02.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	38 kecamatan	203.337,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.03.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	24,0 - 24,5 %	5.994,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	69,6 - 70,1		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.04.12 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	24,4 - 24,9 %	521.711,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	65,3 - 65,8		
02.03.04.14 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,48 IPKP	47.136,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
02.03.04.15 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,57 IPKP	46.406,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
02.03.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1, 5	56,95	65.721,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat	1, 5	73,15	56.246,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	1, 5	65,96	31.964,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	1, 5	53,65	3.793,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.04.20 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	100 %	184,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.04.21 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	60,44	670,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.04.22 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	48,20	333,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,29	123.134,1	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	42,5 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	34 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	34 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.667 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	11 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	34 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	2.106.638 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	158.655 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 materi teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	6 persetujuan substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
02.03.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	862 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	40 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	23 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	23 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	23 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.03.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	222.192 bidang	102.948,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	159.677 ha		
02.03.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	18.857 bidang	17.615,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	14.506 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	775,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		
02.03.05.16 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada	1.795,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR Kab/Kota		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota		
02.04 PP: Pembangunan Wilayah Kalimantan	01 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	5,1—5,6 % per tahun	30.284.779,7	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	1	69,19—78,80 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	4,00—4,50 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	0,0 (multitagging)	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan revitalisasi	5	2 destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	6 KI		
02.04.01.01 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	00,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.04.01.02 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas- Singkawang	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.01.03 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan- Berau	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.01.05 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.01.06 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.04.01.07 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batanjung	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Batanjung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.01.08 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Jorong	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Jorong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selatan	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.01.09 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batulicin	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Batulicin	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selatan	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	23,41 %	6.475,2	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	0,00 % ^(a)		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %		
02.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - lada	5	0,00 % ^(a)	1.660,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - lada	5	0,00 % ^(a)	1.355,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - perikanan budidaya	5	209,17 %	150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.34 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - perikanan budidaya	5	-24,72 %	300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kelapa	5	0,04 %	1.408,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - kelapa	5	0,04 %	1.105,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.41 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - kelapa	5	0,05 %	495,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitungan sementara)	5	71,37	29.275.323,8	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (angka perhitungan sementara)	5	68,61		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (angka perhitungan sementara)	5	67,65		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (angka perhitungan sementara)	5	70,98		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (angka perhitungan sementara)	5	81,94		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (angka perhitungan sementara)	5	76,45		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (angka perhitungan sementara)	5	65,43		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (angka perhitungan sementara)	5	73,57		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
	05 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	5	3.399 ha		
	06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.03.02 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	20.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	53.659,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.04.03.04 PRO-P: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	5	3.399 ha	29.197.797,5	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, OTORITA IBU KOTA NUSANTARA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	2.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	1.867,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
02.04.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
02.04.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Kalimantan	1, 5	59,08	652.911,3	
		02 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	55,76		
		03 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	58,76		
		04 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	6,30—6,60 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,49 IPKP		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	37 kecamatan		
02.04.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Barat	1, 5	57,72	49.639,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.07 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	1, 5	61,32	5.573,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.08 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	65,30	1.165,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.09 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	5	14 kecamatan	64.184,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.04.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,52 IPKP	51.400,2	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,39 IPKP	13.365,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.04.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1, 5	61,25	45.443,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	1, 5	62,02	22.877,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.14 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti- Dadahup yang mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti- Dadahup yang mendukung pengembangan <i>food estate</i> sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	30,30	2.921,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang mendukung <i>food estate</i> Provinsi Kalimantan Tengah	5	50,67		
02.04.04.15 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Selatan	1, 5	66,20	46.629,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.16 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar	1, 5	75,28	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.17 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	75,03	544,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.18 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur	1, 5	64,81	570,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur	1, 5	61,35	95.649,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.20 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	58,89	263,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.21 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara	1, 5	54,70	29.126,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.22 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan	1, 5	55,02	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.23 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	54,92	645,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.24 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	5	20 kecamatan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.25 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,44 IPKP	126.813,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.04.26 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,44 IPKP	0,0 (multitagging)	DAK
02.04.04.27 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,44 IPKP	0,0 (multitagging)	DAK
02.04.04.28 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,69 IPKP	59.732,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
02.04.04.29 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Timur	5	3 kecamatan	36.364,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,35	350.069,3	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	42,8 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	61 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	61 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	4.411 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	61 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	4	6 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	7.466.991 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	5.160.993 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	88 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	59 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 persetujuan substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		08 - Jumlah dokumen harmonisasi rancangan peraturan perundangan RDTR calon IKN	5	1 Ranperpu RDTR IKN		
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.445 dokumen		
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	15 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	15 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	131.472 bidang	58.243,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	125.788 bidang		
02.04.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 rekomendasi kebijakan	3.825,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.254 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	43 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	15 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	15 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	47.875 bidang	34.740,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	98.686 ha		
02.04.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	700,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.10 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.237 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	14 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	14 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	14 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	63.809 bidang	17.472,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	7.590 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.000,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	108 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	63 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	137.468 bidang	233.187,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	652.847 ha		
02.04.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	11 rekomendasi kebijakan	900,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara		03 - Jumlah materi teknis RDTR rencana IKN	5	1 rekomendasi kebijakan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		04 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	4 rekomendasi kebijakan		
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	367 dokumen		
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05 PP: Pembangunan Wilayah Sulawesi	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	7,5—8,5 % per tahun	2.614.134,8	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	1	67,84—74,71 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi	1	7,80—8,50 %		
02.05.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPPBPB) terhadap wilayah	5	>1	237.094,5	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	8 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	1 destinasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	2 KI		
02.05.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBP) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.01.02 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinas Pariwisata Prioritas Manado- Likupang	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinas Pariwisata Prioritas Manado- Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBP) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	125.240,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.01.03 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBP) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1	15.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.05.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja- Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBP) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	2.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1	94.354,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.05.01.06 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.05.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %	58.824,2	
		02- Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	-6,66 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2,50 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	-18,75 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	38,47 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	1.360,86 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	1,5 %		
02.05.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kelapa	5	0,05 %	4.046,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - pala	5	-7,31 %	6.006,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - cengkeh	5	0 % ^(a)		
02.05.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - cengkeh	5	2,50 %	1.011,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - pala	5	0,00 % ^(a)		
02.05.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kelapa	5	0,06 %	1.499,1	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - pala	5	0,00 % ^(a)	2.084,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - cengkeh	5	2,39 %		
02.05.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kelapa	5	0,08 %	8.665,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - pala	5	-9,78 %	1.250,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - cengkeh	5	4,39 %		
02.05.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kelapa	5	0,05 %	3.847,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - kelapa	5	0,05 %	860,3	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.21 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - cengkeh	5	0,00 % ^(a)	237,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.26 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.007,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - perikanan budidaya	5	92,33 %	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - perikanan tangkap	5	-18,75 %	2.043,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan tangkap	5	-18,75 %	5.035,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - garam	5	1.611,96 %	2.433,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan budidaya	5	3,15 %	3.715,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.33 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - perikanan tangkap	5	-18,75 %	2.967,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - perikanan tangkap	5	-18,75 %	606,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - perikanan tangkap	5	-18,75 %	271,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.39 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kelapa	5	0,05 %	1.551,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.41 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - tebu	5	1,5 %	2.499,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.44 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - garam	5	1.133,91 %	7.186,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitungan sementara)	5	72,01	907.404,9	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara)	5	66,06		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan sementara)	5	71,30		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (angka perhitungan sementara)	5	78,50		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (angka perhitungan sementara)	5	71,86		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitungan sementara)	5	72,96		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (angka perhitungan sementara)	5	71,97		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (angka perhitungan sementara)	5	63,44		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	10.950,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	79.975,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.03.05 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	773.326,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.05.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	42.653,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Sulawesi	1, 5	64,07	797.279,0	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	56,8		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	61,97		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sulawesi	1	12,20—12,60 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	0 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,51 IPKP		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	18 kecamatan		
		04 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	100 %		
02.05.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	5	14 kecamatan	31.985,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Utara	1, 5	65,75	39.702,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.09 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Minahasa Utara	1, 5	65,44	5.700,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,53	14.367,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.05.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,48	16.636,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah	1, 5	64,80	21.775,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morowali, Buol, dan Poso	1, 5	55,21	31.100,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.14 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	59,29	7.499,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.15 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	14,6 - 15,1 %	22.716,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	69,7 - 70,2		
02.05.04.16 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	100 %	38.842,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.05.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Selatan	1	66,65	286.021,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	1, 5	61,63	30.334,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.19 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	58,11	8.990,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	1, 5	61,35	28.928,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.21 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	1, 5	53,03	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.22 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	58,98	3.246,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Gorontalo	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Gorontalo	1, 5	69,00	29.900,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	1, 5	66,93	138.614,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	65,80	1.859,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Barat	1, 5	61,75	31.904,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.27 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	1, 5	49,64	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.28 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	72,62	2.447,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.29 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Tengah	5	3 kecamatan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.30 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Gorontalo	5	1 kecamatan	4.707,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.05.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,32	613.532,3	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	43,50 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	87 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	87 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	6.475 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	11 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	87 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	4	6 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100,00 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	3.672.412 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.076.472 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	137 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	90 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperda RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 persetujuan substansi RTRW	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
		08 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	8.000 desa		
		02 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	186.277 km ²		
02.05.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1215 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	42 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	19.969 bidang	18.793,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	33.045 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.07 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	2.805,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.09 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.865 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	43 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	14 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	14 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	14 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.10 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	95.182 bidang	45.881,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	51.478 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.11 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.700,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.05.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1457 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	2 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	68 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	25 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	25 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	25 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	220.256 bidang	85.871,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	111.464 ha		



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.14 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 rekomendasi kebijakan	1.100,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	823 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	18 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	37.137 bidang	37.661,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	175.729 ha		
02.05.05.20 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	521 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100,00 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.21 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	15.272 bidang	7.621,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	12.628 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.23 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	594 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100,00 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.24 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	7.858 bidang	12.098,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	27.669 ha		
02.05.05.26 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	2.100 desa	400.000,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	36.166 km ²		
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	36.166 km ²		
02.05.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Gorontalo	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	300 desa	0,0 (multitagging)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	12.054 km ²		
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	12.054 km ²		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.28 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.200 desa	0,0 (multitagging)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	14.520 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	14.520 km ²		
02.05.05.29 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	300 desa	0,0 (multitagging)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	16.593 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	16.593 km ²		
02.05.05.30 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.900 desa	0,0 (multitagging)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	61.241 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	61.241 km ²		
02.05.05.31 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	2.200 desa	0,0 (multitagging)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	45.703 km ²		
		02 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	45.703 km ²		
02.06 PP: Pembangunan Wilayah Maluku	01 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	5	12,7—17,0 % per tahun	2.058.910,5	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Maluku	1	70,06—70,97 nilai minimum-nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	1	9,50—10,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	0,0 (multitagging)	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	1 KI		
02.06.01.01 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.01.02 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %	37.501,6	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	-3,94 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	1,99 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	-18,75 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	133,48 %		
02.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - pala	5	-5,02 %	6.922,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - cengkeh	5	2,40 %		
02.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - kelapa	5	0,04 %	3.007,1	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - kelapa	5	0,03 %	2.358,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - pala	5	-2,93 %	3.074,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - cengkeh	5	0 % ^(a)		
02.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan tangkap	5	-18,75 %	3.649,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan budidaya	5	148,81 %	16.550,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.941,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (angka perhitungan sementara)	5	68,34	123.401,2	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (angka perhitungan sementara)	5	65,11		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (angka perhitungan sementara)	5	71,38		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (angka perhitungan sementara)	5	70,25		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	38.660,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.06.03.03 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	84.741,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Maluku	1, 5	55,35	1.857.356,3	
		02 - Rata-rata nilai indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	60,32		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Maluku	5	38,72		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Maluku	1	16,90—17,20 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	2 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,54		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	34 kecamatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	5	28 kecamatan	87.987,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.06.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1	21,4 - 21,9 %	272.022,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1	66,5 - 67,0		
02.06.04.12 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	6,6 - 7,1 %	59.008,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	64,8 - 65,3		
02.06.04.14 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,52	38.142,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK
02.06.04.15 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,55	87.041,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku	1, 5	56,80	1.236.061,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.06.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku Utara	1	56,90	34.354,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.06.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Maluku Tengah	1, 5	56,89	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.06.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morotai	1, 5	62,34	24.742,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.20 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Maluku	5	46,81	11,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.21 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	34,68	2.149,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.22 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku Utara	5	6 kecamatan	15.834,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.06.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,09	40.651,3	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	23 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	23 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.775 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	23 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	774.399 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	471.485 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	15 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5 nilai		
02.06.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	494 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1281 dokumen	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	24.711 bidang	28.834,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	59.999 ha		
02.06.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	11.491 bidang	9.541,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	22.924 ha		
02.06.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 materi teknis dan Ranperkada	2.275,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07 PP: Pembangunan Wilayah Papua	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua	5	3,9—4,9 % per tahun	5.166.763,2	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Papua	1	62,46—67,04 nilai minimum-nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	1	22,50—23,00 %		
02.07.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	161.718,6	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	4 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	1 destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	1 KI		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.01.01 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1	160.918,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.07.01.02 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.07.01.03 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Sorong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.07.01.04 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Teluk Bintuni	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.07.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	0,9 %	128.254,9	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	-18,75 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	0,00 % ^(a)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - pala	5	0,00 % ^(a)	1.469,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - perikanan tangkap	5	-18,75 %	1.304,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - perikanan tangkap	5	-18,75 %	502,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.02.07 PRO-P: Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	01 - Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Papua	5	3,3 - 3,7 %	124.250,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Tingkat Kemiskinan di Wilayah Papua	5	22,5 - 23,0 %		
		03 - Rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago	1	51,4		
		04 - Rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay	1	65,2		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kontribusi sektor unggulan di Wilayah Papua	01 - Rata-rata kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Wilayah Papua	5	10,0 - 10,5 %		
		02 - Rata-rata kontribusi PDRB sektor industri pengolahan di Wilayah Papua	5	7,6 - 8,1 %		
		03 - Rata-rata kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Wilayah Papua	5	0,5 - 1,0 %		
02.07.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - kelapa	5	0,04 %	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.13 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kelapa	5	0,04 %	728,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Papua Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Selatan - kelapa	5	0,04 %	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.18 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Papua Barat Daya	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat Daya - kelapa	5	0,04 %	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (angka perhitungan sementara)	5	70,87	210.983,1	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (angka perhitungan sementara)	5	67,26		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, kota sedang, kota kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.07.03.02 PRO-P: Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat Daya	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	210.983,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.07.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Papua	1, 5	37,50	4.609.129,5	
		02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan kawasan perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	45,35		
		03 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Papua	5	39,68		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Papua	1	34,3—34,6 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	26 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,57		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	39 kecamatan		
02.07.04.01 PRO-P: SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua	01 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Wilayah Papua	01 - Rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH) di Wilayah Papua	1	66,2 - 66,8 tahun	1.017.806,8	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		02 - Rerata Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Wilayah Papua	1	7,3 - 7,8 tahun		
		03 - Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di Wilayah Papua	1	12,3 - 12,8 tahun		
02.07.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	5	13 kecamatan	96.154,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.04 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua	1, 5	51,69	47.693,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.07 PRO-P: Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	01 - Meningkatkan konektivitas di Wilayah Papua	01 - Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan di Wilayah Papua	2	62,38 km	830.373,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan di Wilayah Papua	2	5 lokasi		
		03 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan di Wilayah Papua	2	21 lokasi		
	02 - Meningkatkan akses infrastruktur dasar di Wilayah Papua	01 - Rata-rata persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Wilayah Papua	2	75,0 - 77,5 %		
		02 - Rata-rata persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Wilayah Papua	2	54,2 - 54,7 %		
		03 - Rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Wilayah Papua	2	41,6 - 42,1 %		
		04 - Rata-rata rasio elektrifikasi di Wilayah Papua	2	99,7 - 99,9 %		
		05 - Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G di Wilayah Papua	2	41,0 - 41,5 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.08 PRO-P: Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Wilayah Papua	01 - Rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Wilayah Papua	5	83,8 - 84,3	52.018,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
02.07.04.26 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Jayapura dan Merauke	1, 5	45,78	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.07.04.27 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Papua	5	29,12	2.168,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		02 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Papua Selatan	5	49,02		
02.07.04.29 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,45	67.629,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.30 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,59	206.470,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.31 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,67	48.833,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
02.07.04.33 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Raja Ampat dan Manokwari	1, 5	41,87	7.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.34 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	35,61	510,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.36 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat	1, 5	46,79	34.596,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.37 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat	5	0 kecamatan	0,0 (mutitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.38 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	26,6 - 27,1 %	629.891,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	62,7 - 63,2		
02.07.04.39 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua	1	25,2 - 25,7 %	68.876,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua	1	63,9 - 64,5		
02.07.04.40 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Selatan	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Selatan	1	21,5 - 22,0 %	184.900,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Selatan	1	58,8 - 59,3		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.41 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Barat Daya	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat Daya	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat Daya	1	24,7 - 25,2 %	544.575,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat Daya	1	63,1 - 63,6		
02.07.04.42 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Selatan	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Selatan	5	15 kecamatan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.43 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Tengah	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Tengah	5	1 kecamatan	17.069,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.44 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Pegunungan	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Pegunungan	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Pegunungan	5	7 kecamatan	28.143,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.45 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat Daya	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Papua Barat Daya	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat Daya	5	3 kecamatan	48.853,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.46 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat	01 - Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat	1, 5	50,07	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.47 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manokwari	01 - Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manokwari	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manokwari	1, 5	33,67	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.48 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Merauke	01 - Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Merauke	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Merauke	1, 5	39,14	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.49 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura	01 - Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura	1, 5	58,43	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.50 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Selatan	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua Selatan	1, 5	39,66	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.51 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Tengah	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Tengah	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua Tengah	1, 5	34,00	8.406,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAK, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.07.04.52 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Pegunungan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Pegunungan	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua Pegunungan	1, 5	31,85	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.07.04.53 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat Daya	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat Daya	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat Daya	1, 5	41,49	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.07.04.54 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan	1	33,6 - 34,1 %	556.442,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan	1	51,3 - 51,8		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.55 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Tengah	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Tengah	1	32,9 - 33,4 %	110.714,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Tengah	1	55,8 - 56,3		
02.07.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,66	56.677,0	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	44 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	44 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.370 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	44 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama Daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.306.822,43 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.343.767 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	15 materi teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	20 persetujuan substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
		08 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.07.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	808 dokumen	1.908,5	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	14 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	14 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	14 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat hak atas tanah	5	5.930 bidang	7.139,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	12.501 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	562 dokumen	4.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	100 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai Indeks Inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	30 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	30 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	30 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat hak atas tanah	5	12.085 bidang	40.514,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	106.662 ha		
02.07.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	11 materi teknis dan Ranperkada	2.325,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	4 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.05.10 PRO-P: Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM	01 - Meningkatnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Wilayah Papua	01 - Rata-rata nilai aspek kebebasan pada Indeks Demokrasi Indonesia di Wilayah Papua	4	81,8 - 82,3	790,0	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KETERANGAN

Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

(a) RO dilaksanakan untuk menjaga tingkat produksi komoditas

CATATAN:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.



PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)		2,10 rata-rata kelahiran per perempuan usia 15- 49 tahun	271.119.098,8	
		02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		100,00 %		
	02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		98,00 %		
		02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		80,00 %		
		03 - Tingkat kemiskinan ekstrem		0-1 %		
	03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	01 - Angka Kematian Ibu (AKI)		183 per 100.000 kelahiran hidup		
		02 - Angka Kematian Bayi (AKB)		16,00 per 1.000 kelahiran hidup		
		03 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan		90,00 %		
		04 - Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita		14 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita		7,0 %		
		06 - Insidensi tuberkulosis		297 per 100.000 penduduk		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		405 kab/kota		
		08 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta		469 kab/kota		
		09 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,80 %		
		10 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		8,70 %		
		11 - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca		396		
		12 - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika		388		
		13 - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains		402		
		14 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		9,29 tahun		
		15 - Harapan lama sekolah		13,30 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		73,49		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,24-91,54		
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		57,67		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		40,00 %		
	06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		49,75 %		
		02 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		43,10 %		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 200		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 300		2 PT		
		05 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 500		3 PT		
		06 - Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		75-80		
		07 - Peringkat pada Olympic Games		30		
		08 - Peringkat pada Paralympic Games		40		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.01 PP: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	100,00 %	3.635.128,2	
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	100,00 %		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	100,00 %		
		04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1	100,00 %		
		05 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	50 %		
03.01.01 KP: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah pedoman/kebijakan/SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan yang disusun	1	60 pedoman/kebijakan/ SOP	9.067,6	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.01.01.01 PRO-P: Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	2.570 inovasi	6.107,3	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	1	100 %		
		03 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	1	100 %		
		04 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	1	100 %		
03.01.01.02 PRO-P: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif	1	50 daerah	2.960,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.01.02 KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	1	1 sistem	63.603,6	
03.01.02.01 PRO-P: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	250 lembaga pengguna	32.205,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		02 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	1.500 lembaga pengguna		
03.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap, dan tepat waktu	01 - Jumlah <i>database</i> kependudukan yang <i>update</i>	1	1 <i>database</i>	31.397,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.03 KP: Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Meningkatkan kualitas pendampingan dan layanan terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	100 %	3.391.740,8	
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	100 %		
		04 - Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan	1	100 %		
		05 - Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan	1	60 %		
		06 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	50 %		
03.01.03.01 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya dan rujukan bagi penduduk miskin dan rentan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan SLRT	1	514 kab/kota	1.626.881,2	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan pusat kesejahteraan sosial	1	1.028 desa/kelurahan		
03.01.03.02 PRO-P: Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendamping pembangunan	01 - Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya	1	14.000 orang	1.764.859,6	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	1	2.300 lembaga		
	02 - Terlaksananya pendampingan melalui pendamping desa	01 - Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	1	35.000 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.01.04 KP: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	1	53,4	170.716,2	
03.01.04.01 PRO-P: Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	1	100 (prov) %	300,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	4	100 %	1.607,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.03 PRO-P: Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	4	70,05	168.809,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.02 PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	98,00 %	159.121.036,8	
		02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	11,00 %		
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	<10,00 %		
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif	1	20,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	74,57 %		
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	25,94 %		
		07 - Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1	20 juta pekerja		
03.02.01 KP: Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	1	2 dokumen	49.025.743,9	
03.02.01.01 PRO-P: Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya perluasan pemahaman publik akan JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	01 - Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional	1	1 dokumen	48.978.750,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI JKN	1	112,9 juta penduduk		
03.02.01.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya penguatan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional berbasis data	01 - Jumlah monitoring dan evaluasi terpadu jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan berbasis digital	1	1 dokumen/sistem	46.993,5	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek yang terintegrasi berbasis NIK	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.02.02 KP: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan	01 - Akurasi penyaluran bantuan sosial	1	60 %	107.548.067,8	
		02 - Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan	1	80 %		
		03 - Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	10.000.000 keluarga		
		04 - Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	1	18.800.000 keluarga		
		05 - Penyaluran bantuan LPG 3 kg	1	15.600.000 keluarga		
		06 - Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	1	15.600.000 keluarga		
		07 - Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	1	7.900-8.000 ribu Mton		
03.02.02.01 PRO-P: Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial bersyarat	1	10.000.000 keluarga	107.548.067,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program kartu sembako murah	1	18.800.000 keluarga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersedianya pasokan hilir migas sesuai kebutuhan	03 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik	1	15.600.000 keluarga		
		01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg	1	15.600.000 keluarga		
		02 - Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	2	7.900-8.000 ribu Mton		
03.02.03 KP: Perlindungan Sosial Adaptif	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang adaptif	01 - Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	500.000 jiwa	368.222,0	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
03.02.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya perlindungan sosial bagi penduduk korban bencana	01 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana alam	1	250.000 jiwa	368.222,0	
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana sosial	1	30.000 jiwa		
		03 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	2.600 jiwa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.02.04 KP: Kesejahteraan Sosial	01 - Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial penduduk rentan	01 - Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	25 %	2.179.003,2	
		02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	20 %		
		03 - Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	46.000 jiwa		
		04 - Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	1	50 %		
		05 - Persentase mobilitas penduduk lanjut usia (lanjut usia yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jari)	1	94 %		
		06 - Persentase kapasitas penduduk lanjut usia (lanjut usia yang tidak mengalami kesulitan dalam melihat, mendengar, berbicara/ berkomunikasi, mengingat/konsentrasi, mengontrol emosi atau mengurus diri)	1	90 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.02.04.01 PRO-P: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kelembagaan bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	50.000 jiwa	504.322,4	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
03.02.04.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	32.604 jiwa	724.901,7	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
03.02.04.03 PRO-P: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (<i>Long-Term Care</i>)	01 - Terlaksananya perawatan jangka panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long Term Care</i>)	01 - Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas	1	28.000 jiwa	21.002,0	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan sosial lanjut usia terintegrasi	1	10 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.02.04.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan napza	01 - Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	10.000 jiwa	928.777,1	KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Jumlah institusi penerima wajib lapor yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	150 jiwa		
	02 - Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak	01 - Jumlah anak telantar yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	38.000 jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang memperoleh penguatan kapasitas	1	250 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	350 lembaga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang	01 - Jumlah tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	8.000 jiwa	29.040.500,1	
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh penguatan kapasitas	1	135 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	200 jiwa		
	04 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi orang dengan HIV	01 - Jumlah orang dengan HIV yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	2.000 jiwa		
	05 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil	01 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh pemberdayaan sosial	1	2.800 KK		
03.03 PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	01 - Persentase persalinan di fasyankes	1	95,0 %	29.040.500,1	
		02 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	1	63,41 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	1	7,40 %		
		04 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	1	18,00 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		
		05 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>TBC Treatment Coverage</i>)	1	90 %		
		06 - Insidensi HIV	1	0,18 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		
		07 - Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	1	90 %		
		08 - Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	1	95 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	420 kab/kota		
		10 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	514 kab/kota		
		11 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	100 %		
		12 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		13 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	83 %		
		14 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	90 %		
		15 - Persentase obat memenuhi syarat	1	97 %		
		16 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	87 %		
03.03.01 KP: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	90,00 %	3.312.464,7	
		02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	28,39 %		
03.03.01.01 PRO-P: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	95,0 %	2.750.675,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), DAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	488 kab/kota		
03.03.01.02 PRO-P: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>)	1	20,00 %	561.789,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03.02 KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	60 %	1.404.731,1	
		02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	10,0 %		
03.03.02.01 PRO-P: Penurunan Stunting	01 - Terwujudnya penurunan stunting	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	100 %	1.404.731,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN PANGAN NASIONAL, KEMENTERIAN AGAMA, DAK
03.03.03 KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit	01 - Persentase orang dengan HIV- AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	1	60 %	15.960.626,1	
		02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	405 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03.03.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	100 %	15.707.737,4	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KESEHATAN, DAK
		05 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	1	469 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	190 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	28 desa		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	514 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	514 kab/kota		
		01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	95 %		
		02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>Treatment Coverage</i>)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	1	500 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	100 %		
		05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	>90 %		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	236 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	28 desa		
03.03.03.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	514 kab/kota	252.888,7	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, DAK
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	514 kab/kota		
03.03.04 KP: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	420 kab/kota	297.050,5	
03.03.04.01 PRO-P: Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	1	90 %	177.621,5	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	420 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03.04.02 PRO-P: Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	1	50 %	119.429,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	1	70 %		
03.03.05 KP: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	8.065.627,7	
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	83 %		
		03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	90 %		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	100 %		
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	100 %		
		06 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	96 %		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	1	65 kab/kota		
		08 - Persentase obat memenuhi syarat	1	97 %		
		09 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	87 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03.05.01 PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	01 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	100 %	4.541.060,1	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAK
		02 - Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	100 %		
		03 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	5.706 FKTP		
		04 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	991 FKRTL		
03.03.05.02 PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	604.135,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	83 %		
		03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	90 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03.05.03 PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	01 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	96 %	376.216,8	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
		02 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	1	95 %		
03.03.05.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan	01 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	1	65 lokasi	2.009.683,1	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	1	2 dokumen		
		03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	1	100 %		
03.03.05.05 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase obat memenuhi syarat	1	97 %	534.532,7	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
		02 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	87 %		
03.04 PP: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya : SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,83	54.881.632,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya : Pendidikan Tinggi	1	0,43		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Membaca	1	34,10 %		
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Matematika	1	30,90 %		
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains	1	44,00 %		
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi : Literasi	1	61,20 %		
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi : Numerasi	1	43,54 %		
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat	1	98,94 %		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/ sederajat	1	93,33 %		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/ MA/ sederajat	1	71,71 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	64,38 %		
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	32,28 %		
03.04.01 KP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	1	100 %	4.254.970,7	
		02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	1	100 %		
03.04.01.01 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	1	2.998 perangkat kurikulum dan pembelajaran	960.809,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, DAK
03.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1	205.538 orang	1.091.190,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.03 PRO-P: Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	1	95 %	814.473,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.04 PRO-P: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan terlayani internet untuk tujuan menunjang pembelajaran	1	90 %	793.874,4	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.01.05 PRO-P: Integrasi <i>Softskill</i> dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi <i>softskill</i> dalam pembelajaran	01 - Kab/kota yang menerapkan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan	1	514 kab/kota	594.623,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.02 KP: Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1	105,75 %	33.740.069,8	
		02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1	93,33 %		
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	1	86,18 %		
		04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA/BA	1	36,63 %		
03.04.02.01 PRO-P: Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	1	12.141 Lembaga	21.559.924,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAK
03.04.02.02 PRO-P: Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 %	11.336.611,1	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.02.03 PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang- kurangnya 100%	1	491 kab/kota	30.767,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang- kurangnya 100%	1	90 kab/kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang- kurangnya 95%	1	152 kab/kota		
03.04.02.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	1	370 kab/kota	812.767,2	KEMENTERIAN AGAMA, DAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.03 KP: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	01 - Persentase daerah yang memiliki Indeks Pemerataan Guru dan Ketersediaan Tenaga Kependidikan Baik	1	39,42 %	15.155.036,6	
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	1	50,94 %		
03.04.03.01 PRO-P: Revitalisasi LPTK	01 - Terlaksananya revitalisasi LPTK	01 - Jumlah LPTK yang direvitalisasi	1	20 lembaga	40.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.03.02 PRO-P: Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	1	52,31 %	375.955,2	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	93,5 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.03.03 PRO-P: Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pemerataan Guru Dikdas Baik	1	199 kab/kota	817.421,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pemerataan Guru PAUD dan Dikmas Baik	1	199 kab/kota		
		03 - Jumlah provinsi yang memiliki Indeks Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus Baik	1	17 provinsi		
03.04.03.04 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu	1	586.258 orang	13.921.660,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.04 KP: Penjaminan Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	84,46 %	1.678.881,6	
		02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	81,33 %		
		03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	80,86 %		
		04 - Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)	1	140 PT		
		05 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)	1	69,02 %		
		06 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)	1	60 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.04.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	101.688 satuan pendidikan	465.750,6	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.04.02 PRO-P: Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	1	10 rekomendasi kebijakan	1.213.131,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05 KP: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 %	52.674,2	
03.04.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	1	38 provinsi	16.950,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05.02 PRO-P: Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Menguatnya strategi pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan	1	514 kab/kota	0,0 ^{a)}	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.05.03 PRO-P: Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan	1	100 %	4.057,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05.04 PRO-P: Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	1	150 kab/kota	31.666,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05 PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	01 - Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko	01 - Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	8,74 %	161.538,8	
		02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	menurun %		
		03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	79,16-81,21		
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	55,00 %		
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	menurun %		
		06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	1	82,58 %		
		07 - Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	6,72 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	1	0,55 %		
		09 - Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	1	6,87 %		
03.05.01 KP: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	01 - Terpuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	81,00	74.274,1	
		02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	71,34		
03.05.01.01 PRO-P: Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,47 %	23.505,4	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah provinsi/kab/kota yang memperoleh peringkat KLA	1	335 provinsi/kab/kota		
03.05.01.02 PRO-P: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	4,00 %	50.768,7	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05.02 KP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	01 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	55 %	67.314,2	
03.05.02.01 PRO-P: Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	01 - Indeks PUG Nasional	1	76,93	21.046,4	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase anggaran responsif gender	1	9,76 %		
03.05.02.02 PRO-P: Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya perlindungan perempuan dari kekerasan	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	100 %	46.267,8	MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.05.03 KP: Kualitas Pemuda	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	1	82,58 %	19.950,5	
		02 - Persentase usia pemuda 16-30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	1	22,05 %		
03.05.03.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	100 %	700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05.03.02 PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Persentase pemuda berusia 16- 30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	1	24,85 %	5.780,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.05.03.03 PRO-P: Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	1	6,72 %	13.470,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.06 PP: Pengentasan Kemiskinan	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	1	50 %	9.776.912,0	
		02 - Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah	1	300.120 rumah tangga		
03.06.01 KP: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	0,17 %	87.174,5	
03.06.01.01 PRO-P: Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	4.000.000 keluarga	87.174,5	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.06.02 KP: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha	1	4.500 lembaga	8.982.683,7	
		02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1	2.800 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.02.01 PRO-P: Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya lembaga yang memperoleh fasilitasi keperantaraan usaha	01 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 badan usaha	2.835.723,0	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL (Terintegrasi dengan PSN)
03.06.02.02 PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha	1	200 badan usaha	6.141.422,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
03.06.02.03 PRO-P: Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH mandiri	1	30 kelompok	5.538,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya)	1	20 kelompok masyarakat		
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal (perhutanan sosial, RHL, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi)	1	1.000 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria	01 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	5	0,0061	558.308,4	
		02 - Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria	5	25 %		
03.06.03.01 PRO-P: Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	5	735.100 ha	268.713,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
03.06.03.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Terlaksananya legalisasi atas TORA dan meningkatnya kualitas data pertanahan	01 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi	5	300.124 bidang	123.778,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.03.03 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria	5	130.700 kepala keluarga	165.816,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.04 KP: Perhutanan Sosial	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat	1	1.750.000 ha	148.745,4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.04.01 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	1	1.750.000 ha	148.745,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
03.07 PP: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,80 juta orang	14.502.350,1	
		02 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	40,95 %		
		03 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	61,71 %		
		04 - Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	5	243 prototipe		
		05 - Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	5	600 produk		
		06 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	5	210 inovasi		
		07 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	5	3.000 paten		
		08 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	1.000 paten		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		09 - Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	1	20,00 %		
		10 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	1	138 PUI		
		11 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	2	10 infrastruktur		
		12 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi	5	5 unit		
		13 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	2	3 unit		
		14 - Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	5	40 produk		
		15 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	5	24 teknologi		
		16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	5	35 teknologi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.01 KP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	17 - Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	1	3 medali	7.158.762,8	
		18 - Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	1	3 medali		
		01 - Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang		
		02 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,8 juta orang		
		03 - Jumlah pemagangan dalam negeri	1	55.000 orang		
		04 - Jumlah pemagangan luar negeri	1	3.000 orang		
		05 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	2.166.224 Orang		
03.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	06 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	341.733 Orang	2.482.814,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		07 - PT Vokasi Berakreditasi A	1	16 PT Vokasi		
		01 - Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	1	200 kesepakatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.01.02 PRO-P: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	1	1.307 SMK	3.988.933,4	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAK
03.07.01.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah SDM SMK, PT Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan	1	13.068 orang	460.299,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
03.07.01.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	1	680 lembaga	75.241,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
03.07.01.05 PRO-P: Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	151.473,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	1	31.159 artikel	676.431,0	
		02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1	59.770 sitasi		
03.07.02.01 PRO-P: Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	01 - Terwujudnya perguruan tinggi sebagai produsen iptek inovasi dan pusat keunggulan	01 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	1	1.812 KI	0,0 ^{a)}	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
03.07.02.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	292.820 orang	676.431,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KEUANGAN
03.07.03 KP: Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Meningkatnya kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	01 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	1.000 paten	1.867.059,4	
03.07.03.01 PRO-P: Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang- bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi Flagship PRN	1	40 produk	153.235,5	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.03.02 PRO-P: Pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Terlaksananya pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	1	350 orang	1.414.508,6	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.03.03 PRO-P: Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penciptaan ekosistem inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	1	8 lembaga	299.315,4	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.04 KP: Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade	1	35 orang	4.800.096,9	
		02 - Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade	1	25 orang		
03.07.04.01 PRO-P: Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan	1	3 kebijakan	5.716,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.02 PRO-P: Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	40 %	85.187,8	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.04.03 PRO-P: Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade, dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	1	16 %	1.129.600,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
		02 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	1	5 %		
		03 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	1	20 %		
		04 - Persentase sekolah khusus/keberbakatan olahraga yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	45 %		
		05 - Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	5 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional	1	30 %		
		07 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Paralimpik pada olahragawan andalan nasional	1	15 %		
		08 - Jumlah pusat pelatihan nasional yang telah beroperasi di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	1	10 provinsi		
		09 - Jumlah atlet elit nasional	1	350 orang		
		10 - Jumlah atlet elit junior nasional	1	950 orang		
		11 - Jumlah atlet talenta muda	1	3.950 orang		
03.07.04.04 PRO-P: Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	1	22 lembaga	13.316,6	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.05 PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	1	250 orang	14.342,8	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat nasional	1	1.000 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.04.06 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	03 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional	1	50 orang	3.547.933,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		04 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat nasional	1	500 orang		
		01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	1	4 unit		
		02 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	1	4 lembaga		
03.07.04.07 PRO-P: Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	01 - Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pelatihan SDM industri dan promosi olahraga	1	500 orang	4.000,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA

KETERANGAN

Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

CATATAN:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental		74,29	8.539.925,8	
		02 - Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila		76,33		
	02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		62,70		
	03 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat		0,65		
	04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmonis sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama		75,80		
	05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga		61,00		
		02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan		22,10 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		71,04		
04.01 PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib; Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,38	559.027,6	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	73,95		
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	78,08		
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	66,39		
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	73,65		
	02 - Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila	01 - Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa	1	75,01		
		02 - Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1	79,42		
		03 - Nilai Dimensi Persatuan Indonesia	1	79,07		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permasyarakatan/ Perwakilan	1	75,43		
		05 - Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	1	72,72		
		03 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	01 - Indeks Kerentanan Keluarga	10,00		
			02 - Indeks Karakter Remaja	69,92		
04.01.01 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	1	63 %	165.906,8	
04.01.01.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (<i>Bullying Free School Environment</i>)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	1	100 %	69.485,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
04.01.01.02 PRO-P: Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	68 %	47.749,7	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan	1	3.600 orang	48.671,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
04.01.02 KP: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Skor rata-rata nilai SKM secara nasional	4	84	9.900,0	
04.01.02.01 PRO-P: Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah instansi dengan nilai SKM "Baik"	4	150 instansi	3.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
04.01.02.02 PRO-P: Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> , dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan tindak lanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	4	25 laporan	6.900,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
04.01.03 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	1	77,72	153.614,2	
		02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1	36		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.03.01 PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	37,46 %	115.903,3	KEMENTERIAN AGAMA, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
04.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kekinambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	1	60,50 %	30.067,5	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
04.01.03.03 PRO-P: Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	01 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam KG bidang politik dan hukum	1	100 %	7.643,4	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		02 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam KG bidang sosial dan budaya	1	100 %		
		03 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam KG bidang ekonomi	1	100 %		
		04 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PHP dari KDRT, ruang publik, SDKK	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PHP dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	1	100 %		
		06 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PA kondisi khusus	1	100 %		
		07 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PHA atas pengasuhan dan lingkungan	1	100 %		
		08 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PKA dari kekerasan	1	100 %		
		09 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dlm pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak	1	100 %		
		10 - Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PHA atas kesehatan dan pendidikan	1	100 %		
04.01.04 KP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	01 - Jumlah pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	110 lembaga	31.757,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.04.01 PRO-P: Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya penguatan Gugus Tugas GNRM dalam rangka pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	76 lembaga	18.852,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.04.02 PRO-P: Penguatan Pusat- Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan	1	34 lembaga	12.905,5	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.05 KP: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	01 - Meningkatnya kualitas koperasi dan kewirausahaan	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	500 unit (kumulatif)	41.085,6	
		02 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	20.000 WUB		
04.01.05.01 PRO-P: Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terlaksananya pembinaan kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang menerima pembinaan	5	700 koperasi	17.328,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
04.01.05.02 PRO-P: Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Terlaksananya pemasyarakatan kewirausahaan	01 - Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan	5	2.500 orang	15.400,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.05.03 PRO-P: Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terlaksananya edukasi cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	5	5.000 orang	8.357,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
04.01.06 KP: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	1	100 %	156.763,0	
04.01.06.01 PRO-P: Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai- Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai- nilai kebangsaan, dan bela negara	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara	1	100 %	75.453,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 %	73.382,4	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.03 PRO-P: Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	1	3 dokumen	4.500,0	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.06.04 PRO-P: Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, ormas, organisasi asing, serta media yang terindikasi menentang ideologi negara	1	3 dokumen	3.427,3	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.02 PP: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	57,60	2.366.583,7	.
		02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	39,01		
		03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	50,00		
04.02.01 KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	1	30 %	588.752,6	
04.02.01.01 PRO-P: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah, dan kearifan lokal	01 - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	1	36 %	78.233,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Jumlah museum milik pemerintah daerah yang ditingkatkan kualitas program publiknya	1	115 unit	456.655,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.01.03 PRO-P: Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	22,57 %	53.863,2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02 KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	1	0,50 %	1.512.285,8	
		02 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	1	50 %		
04.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah produksi film, musik, dan media baru	1	50 produksi	580.969,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
04.02.02.02 PRO-P: Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1	3 <i>event</i>	127.483,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.02.03 PRO-P: Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	75 %	800.833,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	1	3 komunitas	3.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
04.02.03 KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	01 - Terwujudnya pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1	23,06 %	52.778,1	
04.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	1	12 wilayah adat	37.378,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
04.02.03.02 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah lembaga kepercayaan dan lembaga adat yang difasilitasi untuk penguatan lembaga	1	51 lembaga	13.700,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.03.03 PRO-P: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi	1	120 data	1.700,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.04 KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15 persen di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	12 festival	101.986,3	
04.02.04.01 PRO-P: Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Terwujudnya diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	1	51 negara	101.986,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.04.02 PRO-P: Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan	01 - Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	1	2 event	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05 KP: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	100 %	110.781,0	
04.02.05.01 PRO-P: Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah layanan pengelolaan dana abadi kebudayaan	1	1 layanan	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.05.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	01 - Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	1	1.150 orang	88.787,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.03 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	1	200 kelompok masyarakat	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.04 PRO-P: Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 layanan	4.057,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.05 PRO-P: Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama, dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 layanan	17.935,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.03 PP: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Nilai Dimensi Toleransi	1	73,39	4.380.032,3	
		02 - Nilai Dimensi Kesenjangan	1	77,33		
		03 - Nilai Dimensi Kerja Sama	1	76,96		
04.03.01 KP: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	1	94,21 %	1.640.339,6	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1	1:4	806.140,6	KEMENTERIAN AGAMA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
04.03.01.02 PRO-P: Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikiari yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	1	77,60 %	280.804,7	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.03 PRO-P: Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Persentase pesantren yang berwawasan moderat	1	99,00 %	398.779,9	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.04 PRO-P: Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase rumah ibadah yang ramah	1	80 %	154.614,4	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.01.05 PRO-P: Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama	1	9.543 orang	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.02 KP: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	01 - Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	1	76 %	367.543,1	
04.03.02.01 PRO-P: Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	1	5 %	40.642,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
04.03.02.02 PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	01 - Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi	1	18 %	262.742,1	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERTAHANAN
04.03.02.03 PRO-P: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	1	100 %	64.158,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.03 KP: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	01 - Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	1	97,50 %	127.633,4	
04.03.03.01 PRO-P: Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan	1	110 kegiatan	7.142,8	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses	1	32 %	51.653,5	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03.03 PRO-P: Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	1	141 <i>event</i>	68.837,1	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04 KP: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	01 - Terwujudnya peningkatan fasilitas pelayanan keagamaan	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan	1	72 %	2.112.955,6	
04.03.04.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya fasilitas pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi	1	375.000 unit	840.446,2	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/ sukinah/hittaya sukhaya	1	1.819.500 keluarga	18.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.03 PRO-P: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	01 - Persentase produk yang tersertifikasi halal	1	72 %	277.697,3	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar	1	87 %	976.812,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Petugas haji profesional	1	88 %		
04.03.05 KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1	55 %	131.560,6	
04.03.05.01 PRO-P: Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan	1	31,07 %	43.720,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.02 PRO-P: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat	01 - Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan	1	75 %	61.667,2	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.03 PRO-P: Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	1	98,50 %	26.173,4	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.04 PP: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	15,00	1.234.282,2	
04.04.01 KP: Peningkatan Budaya Literasi	01 - Terwujudnya peningkatan budaya literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	1:12	854.130,5	
		02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	1:16.000		
		03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1	23,36 %		
04.04.01.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	1	65.000 orang	75.460,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	1	398 orang	104.715,6	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.01.03 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	1.378 perpustakaan	673.954,2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.04.02 KP: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	01 - Terwujudnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	1	72 %	154.321,4	
		02 - Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	1	20,54		
04.04.02.01 PRO-P: Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah pemelajar BIPA	1	191.045 orang	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	1	6.683 orang	59.439,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.02.03 PRO-P: Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	1	19.193 orang	94.882,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.03 KP: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	01 - Terwujudnya pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Jumlah peserta program mobilitas talenta riset dan inovasi	1	10.500 orang	186.441,8	
04.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Budaya Riset dan Ekperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	01 - Jumlah talenta muda riset dan inovasi yang dibina	1	9.070 orang	164.748,7	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.04.03.02 PRO-P: Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terfasilitasinya hasil riset dan inovasi	01 - Jumlah mitra terfasilitasi	1	3.000 mitra	21.693,1	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
04.04.04 KP: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	5,00 %	39.388,5	
04.04.04.01 PRO-P: Pengembangan Mitra Perpustakaan (<i>Library Supporter</i>)	01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (<i>library supporter</i>)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	781 perpustakaan	12.217,6	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.04.04.02 PRO-P: Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah pojok baca digital di daerah	1	233 lokasi	27.170,9	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN

Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

CATATAN:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 PN: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		63,41 %	151.044.591,0	
		02 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010		65 %		
		03 - Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi		0,50 % (kumulatif)		
		04 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku		68,95 % (kumulatif)		
	02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau		2,03 jam/100 km		
		02 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)		27 %		
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2		94 %		
		04 - Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara		90 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01 PP: Infrastruktur Pelayanan Dasar	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 kota		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan		65,34 %		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio elektrifikasi		~ 100 %		
		02 - Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik		1.400 kWh/kapita		
		03 - Penurunan emisi GRK sektor energi		142 juta ton		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)		100 %		
	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Rasio <i>outstanding</i> KPR terhadap PDB	2	3,26 %	46.140.344,3	
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	2	94,18 %		
		03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	2	83,55 %		
		04 - Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	2	75,99 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	92,76 %		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	15 %		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	2	25,53 %		
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	67,23 %		
		05 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	100 %		
		06 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	86 akses layak termasuk 12 akses aman %		
		07 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	3 %		
		08 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	2	80 penanganan; 20 pengurangan %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	22 menit		
	04 - Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	97 kab/kota		
	05 - Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	63,98 m ³ /kapita		
		02 - Persentase luas sawah beririgasi	2	69,25 %		
		03 - Luas daerah irigasi yang dimodernisasi	2	11.956 ha		
	05.01.01 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah	2	5.118 unit	8.809.223,9	
		02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	2	16.455 rumah tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	166.000 rumah tangga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	2	55.046 unit		
		05 - Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	30,01 ha		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	2	48 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	2	48 kab/kota		
05.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru	01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah	2	5.118 unit	7.305.650,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
05.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	166.000 rumah tangga	16.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	2	16.455 rumah tangga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.01.03 PRO-P: Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah	01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	2	55.046 rumah tangga	1.200.002,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
05.01.01.04 PRO-P: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan termasuk PSU kawasan skala besar	2	17.726 unit	196.406,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.01.05 PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	48 kab/kota	43.143,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.01.06 PRO-P: Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh	01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	30,01 ha	48.021,1	DAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.02 KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	21.131.229 sambungan rumah	11.437.650,7	
		02 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	2	48.265.253 rumah tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	10.409.472 rumah tangga		
		04 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional	2	62.352 sambungan rumah		
		06 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman	2	284.145 sambungan rumah		
		07 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	2	1.730.314 rumah tangga		
		08 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar <i>sanitary landfill</i>	2	4.591.245 rumah tangga		
		09 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R	2	409.077 rumah tangga		
		10 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	2	494.152 rumah tangga		
		11 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	2	88 kab/kota		
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	2	84 kab/kota		
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	0 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	2	2.030 liter/detik	11.231.605,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	12.124 liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	866.135 sambungan rumah		
		04 - Persentase <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) PDAM	2	25 %		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional	2	28 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	2	168 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2	113 kab/kota		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru	2	76 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.02.02 PRO-P: Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R	2	116 kab/kota	205.294,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		10 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST	2	37 kab/kota		
		01 - Persentase PDAM yang memiliki <i>business plan</i> menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	100 %		
		02 - Persentase PDAM dengan tarif <i>Full Cost Recovery</i>	2	100 %		
		03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll.)	2	100 %		
		04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 provinsi		
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 provinsi		
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	90 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.02.03 PRO-P: Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	2	34 provinsi	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	2	4 NSPK		
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	2	2 NSPK		
		04 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 kab/kota		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM	2	102 kab/kota		
05.01.02.04 PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	2	102 kab/kota	250,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 kab/kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki <i>effluent</i> IPAL, IPLT, dan <i>leachate</i> TPA yang memenuhi syarat	2	60 kab/kota		
05.01.03 KP: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	45,99 m ³ /detik	92.329,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.03.01 PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan debit air baku	2	2,5 m ³ /detik	91.829,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.01.03.02 PRO-P: Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	01 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui	2	6 rekomendasi kebijakan	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	2	34 daerah		
05.01.04 KP: Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1	0,85	2.673.341,8	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,15		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,22		
		04 - Rasio kejadian kecelakaan transportasi SDP per 10.000 Pelayaran	2	0,083		
05.01.04.01 PRO-P: Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	194 unit	2.384.905,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 provinsi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.04.02 PRO-P: Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan		03 - Jumlah sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran	2	13 lokasi	288.436,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN SAR NASIONAL
		04 - Jumlah kapal negara KPLP yang dibangun	2	10 (berlanjut) unit		
		05 - Jumlah sarana, prasarana dan sistem navigasi pendukung keselamatan penerbangan	2	8 lokasi		
	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian, dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	3.000 orang		
		02 - Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan <i>Safety and Security</i> SDM Transportasi	1	100.405 orang		
05.01.05 KP: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	02 - Terlaksananya promosi keselamatan jalan nasional	01 - Promosi keselamatan jalan nasional	1	34 promosi	3.303.172,5	
	03 - Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	01 - Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	8 daerah (prov/kab/kota)		
	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	2	64,26 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.05.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	8 wilayah sungai	700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	2	34 daerah		
05.01.05.02 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	6 wilayah sungai	3.148.950,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	2 provinsi		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	6 kawasan pesisir		
05.01.05.03 PRO-P: Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	6 kab/kota	19.472,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	8 CAT		
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	1 wilayah sungai		
		04 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	78 kegiatan		
05.01.05.04 PRO-P: Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	6 unit	134.050,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.01.06 KP: Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	01 - Terbangunnya waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	18,08 miliar m ³	19.824.625,6	
		02 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	1 daerah irigasi		
		03 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	7.031 ha		
05.01.06.01 PRO-P: Perencanaan Pengembangan Bendungan Multiguna dan Pemanfaatan Tampungan Alami	01 - Terlaksananya perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	01 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	2	4 dokumen	4.384,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.06.02 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	18 unit	18.770.675,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
05.01.06.03 PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	13 unit	131.697,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	100,86 MW		
05.01.06.05 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	7.031 ha	917.867,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	181.826 ha		
05.02 PP: Infrastruktur Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	2	94/74/64 %	85.836.684,7	
		02 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	2	1.245 km (kumulatif 2020-2024)		
		03 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	2.161 km (kumulatif 2020-2024)		
		04 - Panjang jaringan KA yang terbangun	2	6.930 km (kumulatif)		
		05 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	7 (berlanjut) lokasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	39 rute		
		07 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun	2	18 (selesai) lokasi (kumulatif)		
		08 - Jumlah bandara baru yang dibangun	2	12 (selesai) lokasi (kumulatif)		
		09 - Jumlah rute jembatan udara	2	45 rute		
05.02.01 KP: Konektivitas Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	01 - Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	2	7 lokasi	71.485.225,3	
		02 - Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun	2	588 km		
		03 - Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun	2	5.769,45 m		
05.02.01.01 PRO-P: Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	01 - Panjang jalan lintas utama pulau dibangun	2	182,0 km	2.414.078,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Panjang jembatan lintas utama pulau dibangun	2	2.748,8 m		
05.02.01.02 PRO-P: Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	01 - Panjang jalan tol yang ditangani dengan APBN	2	7,802 km	37.561.213,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBUR)
		02 - Jumlah Jalan Tol yang dilakukan pengadaan tanah	2	47.000,0 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.01.03 PRO-P: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, Food Estate dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, <i>Food Estate</i> dan KSPN)	01 - Panjang jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN dan IKN) yang ditangani	2	38,409 km	17.029.101,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.01.04 PRO-P: Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) yang dibangun	01 - Panjang jalan dan jembatan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	14,1 km	1.002.302,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.05 PRO-P: Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	1.460,0 km	13.476.529,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
05.02.01.06 PRO-P: Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah	01 - Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	01 - Jumlah prov/kab/kota yang mendapat fasilitasi penguatan kapasitas pemda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang jalan	2	33 prov/kab/kota	2.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
05.02.02 KP: Konektivitas Kereta Api	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	2	36 (berlanjut) km	5.813.317,1	
		02 - Panjang jalur kereta api yang ditingkatkan	2	267 (berlanjut) km		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.02.01 PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api	2	6 lokasi	1.248.617,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.02.02 PRO-P: Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	01 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	21 lokasi	4.364.605,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (IMO)	2	1 paket		
05.02.02.04 PRO-P: Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia	2	8 layanan	200.094,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Tersedianya dana PSO perkeretaapian	2	1 paket (APBN non- Kemenhub)		
05.02.03 KP: Konektivitas Laut	01 - Terwujudnya konektivitas laut	01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	2	27 lokasi	3.521.927,9	
		02 - Jumlah layanan subsidi tol laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	150 rute		
05.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Pelabuhan Utama (Hub)	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut utama	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	1 lokasi	703.700,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.03.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	24 lokasi	813.283,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.03.03 PRO-P: Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	01 - Pelabuhan mendukung kawasan strategis prioritas nasional	01 - Jumlah pelabuhan pendukung kawasan strategis Prioritas Nasional	2	2 lokasi	67.257,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.03.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya penyelenggaraan layanan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	39 rute	1.937.687,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	105 rute		
		03 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 rute		
05.02.04 KP: Konektivitas Udara	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Jumlah layanan angkutan udara dan Angkutan BBM untuk Kargo Perintis	2	45 rute	3.334.888,6	
		02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	2	65 lokasi		
		03 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	264 layanan		
05.02.04.01 PRO-P: Jembatan Udara	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	2	10 lokasi	662.302,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan kargo perintis mendukung jembatan udara	2	45 rute		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.04.02 PRO-P: Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dibangun	2	2 lokasi	102.050,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.03 PRO-P: Pengembangan Bandara Hub Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara hub primer	01 - Jumlah bandara hub primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	53 lokasi	1.948.103,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.04 PRO-P: Pembangunan Bandara Perairan (Waterbased Airport) untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya penyusunan kajian penyiapan pembangunan perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah kajian penyiapan bandara perairan	2	1 lokasi	2.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.05 PRO-P: Layanan Subsidi Angkutan Udara	01 - Terlaksananya layanan angkutan udara perintis	01 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	264 layanan	620.432,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Angkutan BBM angkutan udara perintis	2	10.842 layanan		
05.02.05 KP: Konektivitas Darat	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau, dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	16 lokasi	1.681.325,8	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal tipe A yang dibangun	2	11 lokasi		
		03 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	209 layanan		
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	72 layanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.05.01 PRO-P: Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau, dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	10 lokasi	388.830,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembang an Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Terlaksananya Pembangunan/Pengembang an Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Pelabuhan angkutan sungai danau yang dibangun/dikembangkan	2	6 lokasi	135.574,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.03 PRO-P: Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	3 lokasi	63.901,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.05 PRO-P: Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	72 layanan	921.064,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	209 layanan		
		03 - Jumlah trayek angkutan multimoda yang dilayani	2	52 layanan		
		04 - Jumlah trayek angkutan barang yang dilayani	2	6 layanan		
05.02.05.06 PRO-P: Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	01 - Terlaksananya peningkatan/revitalisasi terminal penumpang Tipe A	01 - Jumlah terminal penumpang Tipe A yang ditingkatkan/direvitalisasi	2	8 lokasi	171.955,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.03 PP: Infrastruktur Perkotaan	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kota)	2	11 lokasi (kumulatif)	3.646.782,2	
		02 - Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan	2	7 kota		
		03 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	7 kawasan		
05.03.01 KP: Transportasi Perkotaan	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	4 kota	3.619.059,2	
		02 - Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	11 kota		
05.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis rel	2	4 kota	2.838.270,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis jalan	2	6 kota		
		03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	54 paket		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya	01 - Jumlah sistem angkutan umum massal yang dikembangkan di perkotaan lainnya	2	1 kota	8.455,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
05.03.01.04 PRO-P: Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	01 - Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	2	4 lokasi	281.733,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT .
05.03.01.05 PRO-P: Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani (termasuk jalan lingkar)	2	6,8 km	84.065,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah lokasi <i>flyover/underpass</i> di perkotaan yang dibangun	2	4 lokasi		
05.03.01.06 PRO-P: Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terselenggaranya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	12 layanan	406.535,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03.02 KP: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	30 % (kumulatif)	12.073,0	
05.03.02.01 PRO-P: Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	19.000.000 rumah tangga (kumulatif)	12.073,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan <i>smart city</i>	5	200 kab/kota (kumulatif)		
05.03.04 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan	2	1 kawasan	15.650,0	
05.03.04.01 PRO-P: Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya fasilitas penanganan permukiman kumuh perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	1 kawasan	15.650,0	DAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.04 PP: Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah produksi tenaga listrik	2	431.281,20 GWh	1.881.266,9	
		02 - Penurunan emisi CO2 pembangkit	2	6,07 juta ton		
		03 - Jumlah pengguna listrik	2	85.216 ribu rumah tangga (kumulatif)		
		04 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	2	1.062.009 sambungan rumah (kumulatif)		
		05 - Jumlah kapasitas kilang minyak	2	1.276.000 <i>Barrel per Calendar Day</i> /BPCD (kumulatif)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.04.01 KP: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	01 - Susut jaringan	2	8,58 %	198.027,2	
		02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	2	20 %		
05.04.01.01 PRO-P: Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	01 - Kapasitas terpasang EBT tambahan	2	3.662,7 MW	198.027,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN
		02 - Jumlah penambahan sistem transmisi	2	1.692/4.490 kms/MVA		
		03 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	43.113/3.119 kms/MVA		
05.04.02 KP: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Penambahan pelanggan baru	2	1.997 ribu pelanggan	1.508.943,1	
		02 - Jumlah penyediaan gas	2	214.983 Setara Barel Minyak (SBM)		
05.04.02.01 PRO-P: Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Terlaksananya perluasan jaringan gas kota	01 - Jumlah Laporan Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN	2	3 laporan	3.994,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.04.02.02 PRO-P: Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	43.113/3.119 kms/MVA	1.504.948,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		02 - Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga	2	71 penyalur		
		03 - Tahapan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang	2	1 ruas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.04.03 KP: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah cadangan operasional BBM	2	23 hari	174.296,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - <i>System Average Interruption Duration Index</i> (SAIDI)	2	8,33 jam/pelanggan/tahun		
	02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi	2	22.442 km (kumulatif)		
05.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi	01 - Jumlah rekomendasi keprospekan migas	2	4 rekomendasi kebijakan	173.659,8	
	02 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	2	5.728 MW		
		02 - Jumlah penambahan sistem transmisi	2	1.692/4.490 kms/MVA		
05.04.03.02 PRO-P: Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya pembangunan kilang minyak bumi	01 - Jumlah peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi	2	1.276 ribu BOPD (kumulatif)	636,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.05 PP: Transformasi Digital	01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	1, 2, 5	8,80 %	13.539.512,8	
		02 - Persentase pengguna internet	2	82,30 %		
		03 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2	75,70 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.05.01 KP: Penuntasan Infrastruktur TIK	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	2	100 % (kumulatif)	11.062.314,7	
		02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	61 % (kumulatif)		
		03 - Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	5	7 %		
		04 - Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	5	0,25 %		
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	95 %		
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2, 5	80 %		
05.05.01.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	5.025 desa (kumulatif)	8.023.355,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
05.05.01.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah infrastruktur digital <i>broadcasting system</i>	2	60 unit	1.873.857,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.05.01.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	01 - Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/ <i>Govermemnt Network</i>)	2	40 %	1.165.101,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
05.05.02 KP: Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,50–5,7 %	1.576.468,8	
		02 - Persentase K/L/D yang memanfaatkan <i>cloud</i> pemerintah	5	50 % (kumulatif)		
05.05.02.01 PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform	5	35 aplikasi (kumulatif)	841.450,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
05.05.02.02 PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah <i>start-up</i> aktif yang terbentuk	5	35 <i>start-up</i>	735.018,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KEUANGAN



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.05.03 KP: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan <i>digital skill</i> untuk menuju ekonomi digital	1	50.000 peserta	900.729,3	
05.05.03.01 PRO-P: Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1, 5	250.000 konten negatif	244.197,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
05.05.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	1	5.000.000 orang	645.567,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
05.05.03.03 PRO-P: Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK	01 - Persentase pengembangan laboratorium BBPPT sebagai pusat TIK	1	100 %	10.964,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)

KETERANGAN

Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

CATATAN:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.



PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06 PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		69,74	7.196.758,9	
	02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB		1,25 %		
	03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif		27,27 %		
		02 - Persentase penurunan emisi GRK - tahunan		27,30 %		
		03 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK		31,64 %		
06.01 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	5	55,50	2.128.919,1	
		02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5	60,50		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,50		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	5	65,50		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.01 KP: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1.141 lokasi	1.130.911,6	
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	3.750 perusahaan		
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 juta ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari <i>baseline</i>	5	2,00 %		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 juta ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perairan	5	29,3 juta ha		
		07 - Akurasi informasi meteorologi	5	93 %		
		08 - Akurasi informasi klimatologi	5	84 %		
06.01.01.01 PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	411 unit	596.697,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	72 unit		
		03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	37 provinsi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.01.02 PRO-P: Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	3.750 badan usaha	20.217,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	3.750 badan usaha		
		03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	30 pelabuhan		
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	113 badan usaha		
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	400 badan usaha		
06.01.01.03 PRO-P: Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Akurasi informasi meteorologi publik	5	90 %	100.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
		02 - Akurasi informasi meteorologi penerbangan	5	100 %		
		03 - Akurasi informasi meteorologi maritim	5	89 %		
		04 - Akurasi informasi iklim	5	84 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.01.04 PRO-P: Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	2.175 desa	241.535,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	110 KHG		
06.01.01.05 PRO-P: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	3.350 lembaga/komunitas	51.643,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	25 produk		
06.01.01.06 PRO-P: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 juta ha	93.494,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	17,89 juta ha		
		03 - Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan	5	20 jenis		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.01.07 PRO-P: Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	04 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	17 unit	27.323,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		05 - Jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan	5	2 unit		
		01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	5	9,35 juta ha		
		02 - Jumlah layanan balai kliring keanekaragaman hayati	5	1 layanan		
		03 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi	5	8,86 juta ha		
06.01.02 KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	69,80 juta ton	282.763,2	
		02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i>	5	60 %		
		03 - Jumlah limbah B3 yang terkelola	5	126,49 juta ton		
		04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari <i>baseline</i> 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,053 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.02.01 PRO-P: Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	34 lokasi	22.472,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	5	38 unit		
06.01.02.02 PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	19,70 juta ton	141.130,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAK
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,10 juta ton		
06.01.02.03 PRO-P: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	20 %	10.200,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	5 unit		
06.01.02.04 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	5	3 unit	108.960,5	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	18 unit		



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.03 KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	350.000 ha	395.713,4	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	210.750 ton		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	40 lokasi		
		04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 jenis		
06.01.03.01 PRO-P: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	208.104,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	50.000 ha		
06.01.03.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.220 ha	40.448,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang terpulihkan	5	200.000 ton		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non-institusi yang dipulihkan	5	10.750 ton		
06.01.03.03 PRO-P: Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	40 lokasi	5.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.03.04 PRO-P: Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	5	280.000 ha	28.385,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	5	12.812 ha		
06.01.03.05 PRO-P: Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	5	19.541.858 ha	113.375,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Terintegrasi dengan PSN)
06.01.04 KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	70 %	319.530,9	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	365 kasus		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	2.100.000 ha		
		04 - Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	5	8 daerah		
06.01.04.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	40 kajian	68.200,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.04.02 PRO-P: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	800 badan usaha	157.097,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	5	1 sistem		
		03 - Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	5	180 operasi		
		04 - Jumlah layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	5	205 layanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.04.03 PRO-P: Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	320 perkara	94.233,8	MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	45 perkara		
06.02 PP: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,10 %	3.585.872,9	
		02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	1,15 %		
		03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	3,00 menit		
06.02.01 KP: Penanggulangan Bencana	01 - Meningkatnya sistem dan respons peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	1,36	2.103.275,8	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	100 %		
		03 - Indeks Risiko Bencana Indonesia	5	129,62		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.02.01.01 PRO-P: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 layanan	192.071,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 kegiatan		
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 kegiatan		
06.02.01.02 PRO-P: Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas sistem, regulasi, dan tata kelola bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 kajian	1.700,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 sistem		
06.02.01.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	300 kab/kota	602.206,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	85 %		
06.02.01.04 PRO-P: Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	1	50 kajian	3.600,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
		02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	5	55 dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.02.01.05 PRO-P: Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,20 jiwa	619.884,9	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Persentase waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 jam	1	100 %		
06.02.01.06 PRO-P: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	100 %	4.218,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 %		
06.02.01.07 PRO-P: Penguatan Sistem Mitigasi Multiancam Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multiancam bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multiancam Bencana (MHEWS) terpadu	2	1 sistem	679.594,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 kelompok		
		03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancam bencana	1	514 kab/kota		
		04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0059		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.02.02 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,732 %	1.482.597,1	
		02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,072 %		
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,251 %		
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,093 %		
06.02.02.01 PRO-P: Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	7 kawasan	421.167,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen	5	20 pelabuhan		
		03 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	8,5 km		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.02.02.02 PRO-P: Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Tambah debit air baku di kawasan rawan air	2	2,5 m ³ /detik	1.038.248,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	8 wilayah sungai		
		03 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	14.000 ha		
06.02.02.03 PRO-P: Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	2	200 unit	21.317,6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	2.950 orang		
06.02.02.04 PRO-P: Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan lingkungan sehat	1	514 daerah (kab/kota)	1.863,7	KEMENTERIAN KESEHATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi - kumulatif	5	10,15 %	1.481.967,0	
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi - tahunan	5	11,8 %		
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan - kumulatif	5	37,79 %		
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan - tahunan	5	57,23 %		
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah - kumulatif	5	6,99 %		
		06 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah - tahunan	5	9,39 %		
		07 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU - kumulatif	5	5,24 %		
		08 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU - tahunan	5	2,87 %		
		09 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan - kumulatif	5	6,90 %		
		10 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan - tahunan	5	7,30 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.01 KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional	5	19,50 %	170.872,4	
		02 - Intensitas energi primer	5	133,8 SBM/miliar rupiah		
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,8 SBM/miliar rupiah		
06.03.01.01 PRO-P: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	730,64 megawatt	158.558,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	5	11,30 juta kilo liter		
06.03.01.02 PRO-P: Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	5	100 %	12.314,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
06.03.02 KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	350.000 ha	278.131,1	
		02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	470.000 ha		
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.02.01 PRO-P: Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	30.000 ha		
06.03.02.02 PRO-P: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	5	17.000 ha	54.800,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Luas penanaman pada hutan produksi	5	453.000 ha		
06.03.02.03 PRO-P: Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Penurunan laju deforestasi	5	200.000 ha/tahun	0,0 (multitagging)	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	100.000 ha	223.331,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
06.03.03 KP: Pengelolaan Limbah	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	5	69,80 juta ton	996.405,6	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.03.01 PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	19,70 juta ton	996.405,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,10 juta ton		
06.03.04 KP: Pengembangan Industri Hijau	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	71 perusahaan	36.050,0	
		02 - Jumlah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah kebijakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan kebijakan penerapan ekonomi sirkuler di sektor industri	5	2 rekomendasi kebijakan		
06.03.04.01 PRO-P: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi industri yang lebih berkelanjutan	01 - Jumlah rancangan standar industri hijau	5	8 NSPK	36.050,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
06.03.05 KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	5	3.000 ha	507,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.05.01 PRO-P: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil	5	40 lokasi	507,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KETERANGAN

Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

CATATAN:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.



PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 PN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		82,48	72.792.929,7	
		02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah		81 %		
	02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional		4,94		
	03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,58		
	04 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	01 - Indeks Pelayanan Publik Nasional		4,00		
	05 - Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	01 - Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya		100 %		
07.01 PP: Konsolidasi Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	4	80,87	36.611.162,2	
		02 - IDI Aspek Kebebasan	4	84,31		
		03 - IDI Aspek Kesetaraan	4	82,32		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	11 dokumen		
07.01.01 KP: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu	4	77,60	35.627.657,7	
07.01.01.01 PRO-P: Penguatan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu	01 - Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu	4	553 satker	35.487.072,6	KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, MAHKAMAH KONSTITUSI RI, KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.01.01.02 PRO-P: Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Menguatnya peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	3	2 rekomendasi kebijakan	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Meningkatnya bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	1	126.376.418 suara sah	126.376,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.04 PRO-P: Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Menguatnya demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila	1	750 orang	10.833,5	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.01.01.05 PRO-P: Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	1	38 provinsi	2.875,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.02 KP: Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Terbebas dari ancaman dan/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan	4	96,85	611.150,7	
		02 - Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif	4	62,80		
07.01.02.01 PRO-P: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terselenggaranya pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran dan berkelanjutan	01 - Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	4	96,30	3.350,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.01.02.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	01 - Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN	01 - Netralitas penyelenggara pemilu	4	83,50	607.400,7	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTAHANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
07.01.02.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang mendapat penguatan ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan	1	1.200 orang	400,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	80,50 %	372.353,8	
		02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	95 %		
		03 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 orang		
07.01.03.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas- asas keterbukaan informasi publik	3	11 dokumen	35.123,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
07.01.03.02 PRO-P: Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	80 %	104.121,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 orang	188.377,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.04 PRO-P: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	1.000 orang	693,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.01.03.06 PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	79,00	20.079,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	66 lembaga penyiaran	23.959,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.02 PP: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	5	16 forum	369.887,5	
		02 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	1	4,00		
		03 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	92,00		
07.02.01 KP: Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	01 - Menguatnya integritas NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri	01 - Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	1	85,00 %	320.239,5	
		02 - Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	2	52,43		
07.02.01.01 PRO-P: Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 %	23.553,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.02.01.02 PRO-P: Penguatan Pelindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan pelindungan WNI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	1	98,40	296.686,2	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	98,00		
		03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	98,00		
07.02.02 KP: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	5	152 program/kegiatan	24.876,8	
07.02.02.01 PRO-P: Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	5	190,00 miliar rupiah	21.081,8	SEKRETARIAT NEGARA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
07.02.02.02 PRO-P: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (<i>Enabling Environment</i>) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,96-3,16 %	3.795,0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.02.03 KP: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	86,00 %	21.651,3	
07.02.03.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset- aset diplomasi publik Indonesia	5	99,00 %	21.651,3	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
07.02.04 KP: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	98,00 %	3.119,9	
		02 - Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	5	99,00 %		
		03 - Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	5	92,00 %		
		04 - Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	5	97,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.02.04.02 PRO-P: Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10	3.119,9	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
07.03 PP: Penegakan Hukum Nasional	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Perilaku Anti Korupsi	4	4,14	433.881,6	
07.03.01 KP: Penataan Regulasi	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA	3	8,15% dan 7,05%	9.407,9	
07.03.01.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,25 %	1.000,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.01.02 PRO-P: Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	8.407,9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.03.02 KP: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Persentase penyelesaian perkara gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	98 %	63.619,5	
		02 - Pemanfaatan <i>e-filing</i> di lingkungan pengadilan negeri	5	97 %		
		03 - Pemanfaatan <i>e-filing</i> di lingkungan pengadilan agama	5	40 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Pemanfaatan <i>e-litigasi</i> di lingkungan pengadilan negeri	5	16 %		
		05 - Pemanfaatan <i>e-litigasi</i> di lingkungan pengadilan agama	5	10 %		
		06 - Pemanfaatan SIP untuk penanganan perkara kepailitan dan PKPU	5	30 %		
		07 - Peningkatan pendaftaran jaminan fidusia	5	Naik 1% dari baseline T-1 %		
		08 - Persentase pelaku residivis	5	6,56 %		
07.03.02.01 PRO-P: Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 %	7.152,9	MAHKAMAH AGUNG
07.03.02.02 PRO-P: Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan	1	15 %	19.901,7	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.03.02.03 PRO-P: Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di bidang hukum dan peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 wilayah kerja	18.066,1	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	8	18.498,7	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
07.03.03 KP: Penguatan Sistem Anti Korupsi	01 - Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi	01 - Survei penilaian integritas	5	76,00	159.387,9	
07.03.03.01 PRO-P: Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	100 %	50.507,4	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.03.02 PRO-P: Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	1	160 orang	108.880,5	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), KEMENTERIAN KEUANGAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
07.03.04 KP: Peningkatan Akses terhadap Keadilan	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses Terhadap Keadilan	5	71-80 %	201.466,3	
07.03.04.01 PRO-P: Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	71-80 %	180.815,6	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
07.03.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	71-80 %	20.650,7	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.04 PP: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi	01 - Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	4	4,20	261.653,5	
		02 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi	4	4,00		
		03 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	4	3,80		
07.04.01 KP: Transformasi Manajemen SDM Aparatur	01 - Meningkatnya skor <i>employee engagement</i> dan <i>employee branding</i>	01 - Skor <i>Employee Engagement</i>	1	15,48 %	58.905,0	
		02 - Skor <i>Employer Branding</i>	1	7,66 %		
07.04.01.01 PRO-P: Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding	01 - Terwujudnya pelaksanaan core values ASN BerAKHLAK	01 - Hasil Pengukuran Indeks BerAKHLAK	1	67,13 %	4.500,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.02 PRO-P: Percepatan Peningkatan Kapasitas SDMA	01 - Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN melalui penggunaan fitur <i>learning</i> pada platform tunggal	01 - Persentase Pegawai ASN yang aktif menggunakan fitur <i>learning</i> pada platform tunggal	1	20 % pegawai ASN	3.100,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.03 PRO-P: Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan	01 - Terlaksananya piloting kebijakan manajemen kesejahteraan di Instansi Pemerintah	01 - Jumlah IP yang dilakukan piloting terkait kebijakan manajemen kesejahteraan	4	12 K/L	6.400,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.04 PRO-P: Pengembangan Talenta dan Karier	01 - Terwujudnya manajemen talenta di instansi pemerintah	01 - Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan manajemen talenta ASN	1	100 %	21.205,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.04.01.05 PRO-P: Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN	01 - Terwujudnya platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	01 - Persentase IP yang menggunakan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	1	100 %	15.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
07.04.01.06 PRO-P: Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	01 - Terlaksananya piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	01 - Jumlah IP yang dilakukan piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	1	8 K/L	8.700,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.02 KP: Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	01 - Skor rata-rata penilaian kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	4	82,5	42.146,8	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
		02 - Skor rata-rata penilaian kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI perwakilan	4	75		
		03 - Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas kinerja pelayanan publik	4	86		
07.04.02.01 PRO-P: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E- Services) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-services</i>) yang terintegrasi	01 - Skor indeks pada domain layanan pada SPBE	4	3,14	6.490,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.04.02.02 PRO-P: Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan	4	700 orang	32.906,8	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
		02 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan	4	6.300 orang		
07.04.02.03 PRO-P: Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Persentase inovasi yang memenuhi standar inovasi pelayanan publik	4	82 %	2.750,0	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.03 KP: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional	01 - Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan	4	61	38.431,0	
07.04.03.01 PRO-P: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis yang Efektif	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 K/L	1.875,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.03.02 PRO-P: Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Meningkatnya nilai Indeks SPBE Nasional	01 - Nilai Indeks SPBE Nasional	4	2,60	36.556,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.04.04 KP: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien	01 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (K/L)	4	80	122.170,8	
		02 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Provinsi)	4	71		
		03 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Kabupaten/Kota)	4	67		
07.04.04.01 PRO-P: Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	01 - Persentase rekomendasi RB Nasional yang ditindaklanjuti	4	70 %	12.056,6	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.04.02 PRO-P: Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	01 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	4	24 laporan	110.114,1	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
		02 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	4	72 laporan		
		03 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern badan usaha	4	78 laporan		
		04 - Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	4	730 laporan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.05 PP: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan	01 - Indeks Kekuatan Militer	2	0,20	35.116.344,9	
		02 - Indeks Terorisme Global	5	4,24		
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	3	>60 %		
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3	3,40		
07.05.01 KP: Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Menguatnya keamanan dalam negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	4	37,80	341.921,0	
		02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	4	54,00		
		03 - Angka pelanggaran lintas batas negara	4	<150 pelanggaran		
		04 - Angka kejadian konflik	4	35 kejadian		
		05 - Angka korban pengungsi internal	4	≤14.000 orang		
07.05.01.01 PRO-P: Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Meningkatnya deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - <i>Clearance rate</i> terorisme	5	80 %	112.217,7	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	5	125 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	128 kegiatan		
		04 - Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	5	50 institusi		
07.05.01.02 PRO-P: Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan objek vital dan target rentan	01 - Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan	5	2.079 objek vital dan target rentan	25.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.01.03 PRO-P: Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah pos pamtas, posal, pos pol subsektor, dan PLBN yang dibangun	2	58 m ²	186.826,9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
		02 - Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan	2	200 km		
		03 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankamor	1	180 orang		
		04 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	49 PPKT		
07.05.01.04 PRO-P: Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulangnya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	5	19 kasus	16.715,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	900 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.01.05 PRO-P: Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah korban bencana yang diselamatkan	4	120.000 orang	1.161,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.02 KP: Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	01 - Terwujudnya kemampuan pertahanan yang kuat dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Pemenuhan MEF	4	100 %	27.900.242,6	
		02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 %		
07.05.02.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista	01 - Terlaksananya pengadaan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diadakan	4	22 jenis	17.197.721,1	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.02 PRO-P: Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alutsista	01 - Jenis alutsista yang dirawat	4	13 jenis	5.654.349,8	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.03 PRO-P: Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana- prasarana pertahanan	01 - Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun	2	3 jenis	288.944,5	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.04 PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	01 - Jumlah sarpras profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang dibangun	2	7 jenis	1.348.826,2	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.05 PRO-P: Pembangunan Pertahanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan pertahanan siber	01 - Jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun	4	3 sistem	150.631,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.02.06 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	5	7 jenis	3.259.770,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.03 KP: Penguatan Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	4	202 kasus	1.524.603,1	
07.05.03.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Terpadu	01 - Sistem peringatan dini keamanan laut	01 - Jumlah sistem peringatan dini keamanan laut	4	1 sistem	1.000,0	BADAN KEAMANAN LAUT
07.05.03.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya operasi keamanan laut yang kuat	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	4	100 %	1.522.604,8	BADAN KEAMANAN LAUT, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
07.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana laut	4	80 %	998,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04 KP: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka prevalensi penyalahguna narkotika	1	1,69 %	5.191.148,0	
		02 - <i>Crime rate</i>	4	111 / 100.000 penduduk		
		03 - Pelayanan publik Polri yang prima	4	10 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana narkotika	1	89 %	79.738,2	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	3 kawasan		
07.05.04.02 PRO-P: Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	53,51	90.426,0	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek fisik	1	8,0 %		
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek psikologis	1	8,0 %		
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan sosial	1	7,0 %		
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	6,0 %		
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	4	3,20		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.04.03 PRO-P: Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	85 %	5.481,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04.04 PRO-P: Peningkatan Layanan Kepolisian yang Presisi sebagai Kelanjutan Promoter	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang Presisi sebagai kelanjutan promoter	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,5	37.751,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - <i>Clearance rate</i>	4	67 %		
		03 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	60 %		
07.05.04.05 PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah almatsus dan alpalkam kepolisian	2	6 paket	4.374.585,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan	5	40 %		
07.05.04.06 PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Anggota Polri	01 - Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri	01 - Jumlah personel yang tersertifikasi diklat profesional	1	4.500 personel	603.166,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	603 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 unit		
		04 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	80 %		
07.05.05 KP: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor <i>Global Cyber Security Index</i>	1, 2	90,04	158.430,2	
07.05.05.01 PRO-P: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	2	17,5	13.742,1	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
07.05.05.02 PRO-P: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber yang kuat	01 - Skor pilar <i>organizational</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	4	13,60	113.797,9	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Skor pilar <i>technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	2	17,50		
		03 - Skor pilar <i>capacity development</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1	18,90		
07.05.05.03 PRO-P: Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana siber	5	65 %	16.390,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.05.04 PRO-P: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional bidang siber	01 - Skor pilar <i>cooperation</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1, 5	14,40	14.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024; (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPANITIAAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
Silvanna Djaman